



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kebumen memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan;

- b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1999 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJP Daerah dituangkan dalam tahapan dan skala prioritas, yaitu RPJM Daerah Tahap I Tahun 2005–2009, RPJM Daerah Tahap II Tahun 2010–2014, RPJM Daerah Tahap III Tahun 2015–2019, dan RPJM Daerah Tahap IV Tahun 2020–2024.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

RPJP Daerah ini mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya RPJM Daerah tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

Ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2005-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah itu disusun oleh pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati; dan
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dibuat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari wilayah Indonesia juga membutuhkan perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan Bupati secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan pentingnya menyusun perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Khusus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen yang pertama kali disusun untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mulai

tahun 2005 sampai dengan 2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga untuk memenuhi amanat dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai

pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ini didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diantara data tersebut berasal dari data Produk Domestik Regional Bruto dan statistik yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pelayanan umum dan fisik prasarana. Data itu mencakup:

1. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
3. Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
4. keuangan daerah;
5. potensi sumber daya daerah;
6. produk hukum daerah;
7. kependudukan;

8. informasi dasar kewilayahan; dan
9. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: tahap teknokratif, partisipatif, dan politis. Tahap teknokratif dilakukan dengan pengolahan data dan proyeksi. Tahap partisipatif dilakukan melalui serangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. Sedangkan tahap politis adalah proses pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan disetujui menjadi pengesahan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen: masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang ada di daerah.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 disusun dan ditetapkan dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen tersebut disusun dan ditetapkan dengan tujuan :

1. memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi dan program yang telah disepakati;

2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
3. menjamin terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. untuk memberikan pedoman bagi penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, arah dan program Bupati.

D. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

E. HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya, baik yang bersifat regional (Provinsi Jawa Tengah) maupun nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi tersebut telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sehingga secara rasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen sendiri. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Kebumen masuk segmen 4 (Kebumen-Purworejo-Kulonprogo-Bantul) dengan Pusat Kegiatan Nasional di Yogyakarta. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen masuk dalam kawasan strategis Barlingmascakeb, serta dalam Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen saat ini dengan maksud mengetahui keadaan Kabupaten Kebumen dari berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi serta gambaran proyeksinya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang analisa terhadap potensi, kendala, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Kebumen berdasarkan gambaran umum, untuk merumuskan isu strategis Kabupaten Kebumen saat ini sampai dengan 20 tahun ke depan. Bahan untuk merumuskan isu strategis ini diperoleh melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

BAB IV. VISI DAN MISI

Bab ini memuat visi Kabupaten Kebumen untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan disertai uraian penjelasan mengenai kalimat visi tersebut. Disamping itu juga berisi misi, yaitu cara untuk mewujudkan visi Kabupaten Kebumen.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini berisi tentang arah kebijakan yang akan digunakan Kabupaten Kebumen untuk dapat mewujudkan visi. Arah kebijakan tersebut merupakan rumusan kebijakan untuk masing-masing misi yang diemban, serta arah kebijakan untuk tiap-tiap tahap 5 (lima) tahunan yang diuraikan berdasarkan fungsi pembangunan.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen, yang menjelaskan tentang tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama

pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dari keseluruhan naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen dan berisi himbauan kepada segenap pemangku kepentingan antara lain eksekutif, yudikatif, legislatif, pelaku usaha dan masyarakat luas untuk mendukung dan berkomitmen terhadap terwujudnya Visi Kabupaten Kebumen 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Secara administratif, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sekitar 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Luas wilayah darat 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² dan wilayah laut 6.867 km². Secara astronomis terletak diantara 109°22'–109°50' Bujur Timur dan 7°27'–7°50' Lintang Selatan. Kabupaten Kebumen dalam konteks regional merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Barat dan memanjang di pulau Jawa bagian Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo,
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo,
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia,
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan Nasional telah menunjukkan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial-budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, keamanan dan ketertiban wilayah, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan Daerah tersebut juga telah mampu meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tercermin dalam berbagai indikator. Hal tersebut tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk melangkah ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen pada Tahun 2001 sebesar 64,00 meningkat mencapai angka 68,9 pada Tahun 2005. Secara rinci, capaian komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia tersebut adalah untuk Angka Harapan Hidup meningkat dari 68,63 Tahun 2003 menjadi 68,83 Tahun 2005, Angka Melek Huruf meningkat dari 88,6 pada Tahun 2003 menjadi 89,07 pada Tahun 2005, paritas daya beli menurun dari Rp. 546.547,87 Tahun 2003 menjadi Rp. 544,898.50 Tahun 2005, Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) menurun dari 7,25 tahun pada Tahun 2003 menjadi 6,97 tahun pada Tahun 2005, dan Pendapatan per Kapita meningkat dari Rp. 1.543.503,33 Tahun 2001 menjadi Rp. 2.360.449,90 pada Tahun 2005. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen dalam konteks regional Provinsi Jawa Tengah meningkat dari ranking 33 Tahun 2003 menjadi ranking 24 pada Tahun 2005 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada.

Selanjutnya, akan diuraikan kondisi kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang ada sampai saat ini dan proyeksinya di masa mendatang, sebagai berikut :

A. KONDISI SAAT INI

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Aspek sosial budaya dan kehidupan beragama merupakan sendi utama pembangunan (baik nasional maupun daerah) karena di dalamnya terdapat unsur penduduk yang merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan dan mempunyai tingkat *turbulensi* yang tinggi serta perluasan dampaknya tidak bisa dikalkulasikan.

a. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2001 sebanyak 1.164.940 jiwa, terdiri atas 588.652 jiwa laki-laki dan 585.654 jiwa perempuan. Tahun 2002 naik menjadi 1.174.306 jiwa, 1.183.756 jiwa pada Tahun 2003, Tahun 2004 sebesar 1.193.978 jiwa dan Tahun 2005 menjadi 1.212.809 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama kurun waktu 2001-2005 adalah 0,8% yang berarti masih di atas pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67%. Kemudian, berdasarkan sensus penduduk Tahun 1990 dan 2000, maka terlihat bahwa pertumbuhan penduduk turun dari 0,86% Tahun

1990 menjadi 0,39% pada Tahun 2000. Ini berarti program Keluarga Berencana berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu yang sama cenderung mengalami kenaikan dari angka 917 jiwa/km² pada Tahun 2001 menjadi 947 jiwa/km² pada Tahun 2005.

Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terus dilakukan antara lain melalui pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana serta kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber-Keluarga Berencana dan penguatan jaringan program. Peserta Keluarga Berencana aktif Tahun 2001 tercatat 136.357 akseptor dan meningkat menjadi 150.823 akseptor pada Tahun 2005.

b. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di berbagai sektor pada Tahun 2005 sebanyak 623.425 jiwa atau naik 2,49% dari Tahun 2001 yang sebesar 608.308 jiwa. Jumlah tersebut terdistribusi pada berbagai sektor ekonomi dengan persentase yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Sektor terbanyak yang menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu 52,85% dan sektor jasa-jasa sebesar 19,30%.

Penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) selama Tahun 2001-2005 meningkat yaitu dari 722.852 jiwa Tahun 2001 menjadi 750.880 jiwa pada Tahun 2005. Selama kurun waktu itu, angka ketergantungan berkisar antara 61-62. Hal ini berarti, setiap 100 penduduk Kabupaten Kebumen yang berusia produktif (umur 15-64 tahun) harus menanggung antara 61-62 orang non produktif (umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan diri di daerah penempatan. Banyaknya jumlah transmigran dari Kabupaten Kebumen selama Tahun 2001-2005 sebanyak 175 Kepala Keluarga atau 614 jiwa.

c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari jumlah KK Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Pada Tahun 2001 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen tercatat 170.846 KK atau 57,68% dari jumlah KK yang ada. Sedangkan Tahun 2005 angka tersebut naik menjadi 174.802 KK atau 56,87% dari jumlah KK yang ada. Dengan demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi penurunan 0,81%. Angka ini menempatkan

Kabupaten Kebumen pada posisi ketiga terbesar di Provinsi Jawa Tengah dalam hal jumlah penduduk miskin setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Grobogan. Jumlah penduduk miskin ini cenderung meningkat meskipun proporsi persentasenya menurun. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang laten sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM SD dan SMP selama Tahun 2001-2005 cenderung meningkat. APM SD pada Tahun 2001 sebesar 83,59% meningkat menjadi 91,28% pada Tahun 2005. Sedangkan APM SMP naik dari angka 59,17% Tahun 2001 menjadi 66,68% pada Tahun 2005. Demikian pula APM SLTA naik dari 38,25% pada Tahun 2001 menjadi 41,96% Tahun 2005. Kemudian APK SD naik dari angka 99,37% pada Tahun 2001 menjadi 104,70% pada Tahun 2005. APK SMP naik dari 81,78% menjadi 90,06%. Untuk APK SMA naik dari 52,13% menjadi 57,54%.

Rasio murid-guru untuk jenjang SD/ sederajat membaik sedikit dari angka 22,40% Tahun 2001 menjadi 21,46% pada Tahun 2005. Pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, rasio murid-

guru juga membaik dari angka 17,21% Tahun 2001 menjadi 16,49% Tahun 2005. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat, rasio guru murid membaik cukup berarti, yaitu dari 18,31% Tahun 2001 menjadi 16,50% pada Tahun 2005.

Hal ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang meningkat secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk jumlah SMP/ Sederajat meningkat dari 171 unit pada Tahun 2001 menjadi 177 unit pada Tahun 2005. Untuk jumlah SMA/ Sederajat juga meningkat dari 73 unit pada Tahun 2001 menjadi 87 unit pada Tahun 2005. Namun, untuk jumlah SD/ Sederajat mengalami penurunan dari 991 unit pada Tahun 2001 menjadi 953 unit pada Tahun 2005. hal ini terjadi karena adanya regrouping alamiah. Disamping itu, terdapat juga Perguruan Tinggi yaitu; Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Kampus Kebumen, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Akademi Manajemen Ilmu Komputer PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, Politeknik Dharma Patria Karanganyar, Sekolah Tinggi Teknik Muhammadiyah Gombong dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.

e. Kesehatan

Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat selama kurun waktu yang sama juga menunjukkan peningkatan. Angka Kematian Bayi (AKB/1000 Kelahiran) turun dari 11,06 pada Tahun 2002 menjadi 9,25 pada Tahun 2005. Namun, Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 ibu melahirkan) masih relatif sama yaitu dari 59,57 pada Tahun 2002 menjadi 59,71 Tahun 2005.

Pada kurun waktu 2001-2005, Angka Harapan Hidup telah mengalami peningkatan dari 68,63 Tahun 2003 menjadi 68,83 Tahun 2005. Angka Kesakitan menurun dari 16% Tahun 2000 menjadi 14,19% pada Tahun 2003. Lama Sakit Masyarakat rata-rata pun terus turun; dari 6,2 hari Tahun 2000 menjadi 6,02 hari pada Tahun 2003. Dalam periode yang sama, keluhan kesehatan masyarakat pun menurun dari 31,6% pada Tahun 2000 menjadi 28,1% pada Tahun 2005. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kondisi tersebut tentu berkait dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Di antaranya, jumlah rumah sakit sebanyak 8 (delapan) buah, Puskesmas perawatan dari 3 (tiga) buah, Puskesmas non perawatan sebanyak 30 buah, dan Puskesmas pembantu 75 buah. Berdasarkan rasio ini sebetulnya

masih diperlukan penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat, karena idealnya 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Oleh karenanya, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka didirikan Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan secara merata dan proporsional berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Di sisi lain ketersediaan tenaga medis yang ada masih memerlukan penambahan dari kondisi yang ada dimana jumlah dokter umum 130 orang, dokter gigi 29 orang, bidan 163 orang, bidan desa 291 orang dan perawat 627 orang.

f. Agama

Jika dilihat dari aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen beragama Islam. Walaupun umat Islam merupakan mayoritas, kerukunan kehidupan beragama sangat terjaga di Kabupaten Kebumen. Dari segi sarana ibadah, jumlahnya secara proporsional mengikuti jumlah pemeluk agama. Pada Tahun 2005 di Kabupaten Kebumen terdapat tempat peribadatan antara lain 1.229 buah masjid, 4.588 langgar/mushola, 51 gereja dan 8 vihara. Jumlah tempat peribadatan tersebut sebanding dengan jumlah pemeluk agama dimana 98,68% penduduk Kabupaten Kebumen beragama Islam, 0,54% Kristen Protestan, 0,49% Katholik, 0,23% Budha,

0,02% Hindu dan 0,04% penduduk memeluk agama/kepercayaan lainnya. Proporsi tersebut cenderung tetap dari tahun ke tahun yang menandakan tidak adanya perubahan struktur penduduk dari segi kepelemukan agama.

g. Perpustakaan

Pada Tahun 2005, kondisi perpustakaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi jumlah koleksi, pengunjung dan fasilitas penunjangnya. Saat ini, Kabupaten Kebumen mempunyai 1 unit perpustakaan umum daerah, dengan jumlah koleksi buku mencapai lebih kurang 30.000 ekslembar dengan jumlah judul buku lebih kurang 1500 judul buku. Meskipun cukup mengalami peningkatan, jumlah koleksi buku tersebut masih belum memenuhi standar nasional jumlah koleksi buku yang harus disediakan oleh sebuah perpustakaan kabupaten yang mencapai 48.000 koleksi buku. Oleh karena itu, masih dibutuhkan perhatian lebih untuk mengembangkan perpustakaan umum daerah di masa yang akan datang.

h. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda adalah tulang punggung perubahan dan pembangunan. Namun, saat ini, kondisi kepemudaan masih cukup memprihatinkan. Kecenderungan yang terjadi adalah pengaruh

negatif era keterbukaan informasi dan komunikasi saat ini telah merusak mental dan perilaku pemuda. Kasus-kasus kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seks bebas menjadi berita/pemandangan yang biasa. Searah dengan itu, kondisi keolahragaan, baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat juga masih memprihatinkan dan sangat memerlukan perhatian bersama. Dilihat dari ukuran prestasi, olahraga Kabupaten Kebumen belum pernah mampu menjadi yang terbaik dalam event-event olahraga antar daerah. Meskipun sebenarnya cukup banyak atlet berbakat dan potensial yang lahir, namun proses pembinaan dan sarana prasarana olahraga yang kurang mendukung menjadi penghalang mereka untuk berkembang.

i. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan fenomena permasalahan kesejahteraan sosial yang masih cukup banyak ditemui di Kabupaten Kebumen. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang, seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar dan pengemis, serta korban kekerasan. Sebagai upaya penanganan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial

pada Tahun 2000 di Kabupaten Kebumen telah didirikan 131 panti asuhan dan panti wreda. Sedangkan pada Tahun 2005 jumlah tersebut naik menjadi 314 panti, yang kesemuanya dikelola oleh swasta. Upaya penanganan telah dilakukan, tetapi belum berhasil mengurangi jumlah penyandang permasalahan kesejahteraan sosial secara optimal.

j. Kebudayaan

Budaya kesenian di Kabupaten Kebumen yang masih cukup eksis antara lain kesenian karawitan, wayang kulit, jam janeng, kuda lumping dan mentiet. Upaya mempertahankan budaya ini sering dilakukan dengan pagelaran-pegelaran seni dan budaya rutin secara tahunan. Sementara itu, budaya gotong royong dan tolong-menolong masih erat terutama di daerah perdesaan. Aspek budaya ini merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal yang sangat penting dan potensial untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang, tanpa harus tercabut dari akar budayanya.

k. Perempuan dan Anak

Jumlah perempuan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2001 sebanyak 585.654 jiwa. Dengan jumlah populasi sebesar ini peran perempuan di Kabupaten Kebumen, belum optimal, meskipun Bupati adalah seorang perempuan. Kesenjangan

gender ini dapat dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan, media, kekerasan berbasis gender dan mekanisme kemajuan perempuan. Masih terjadinya kesenjangan gender berpengaruh pada capaian indikator gender atau *Gender related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowering Measure* (GEM). Kabupaten Kebumen dari Tahun 2001-2005 mempunyai indeks GDI 53,9 atau menduduki urutan 31 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan GEM mencapai indeks 58,6 atau menempati urutan 19 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2. Ekonomi

a. Kondisi dan Struktur Ekonomi

- 1) Untuk melihat struktur perekonomian di Kabupaten Kebumen, salah satunya dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha. Dari data yang ada, ternyata Kabupaten Kebumen masih didominasi sektor pertanian, yang kontribusinya terhadap PDRB (berdasarkan harga berlaku Tahun 2000) dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 30%. Pada Tahun 2005, kontribusi sektor pertanian sebesar 39,81%, diikuti oleh

sektor jasa-jasa 19,59%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 11,35% dan sektor industri pengolahan sebesar 9,82%.

- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat terlihat melalui nilai PDRB atas dasar harga konstan, yang mengalami peningkatan sejak Tahun 2001-2005 rata-rata sebesar 2,45%. Tren pertumbuhan juga terus meningkat, yaitu dari 1,78% Tahun 2001 menjadi 3,21% Tahun 2005. Sedangkan besaran nilai PDRB Kabupaten Kebumen dalam konteks Jawa Tengah berada pada posisi 24 dari 35 Kabupaten/Kota.
- 3) Kinerja perekonomian Kabupaten Kebumen selama Tahun 2001-2005 dipengaruhi oleh sektor angkutan dan perhubungan; sektor jasa-jasa; dan sektor pertambangan dan galian, yang mengalami pertumbuhan tinggi dan cukup stabil masing-masing 18,62% dan 18,18% serta 15,80%. Sektor berikutnya adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,14%, sektor bangunan dan konstruksi sebesar 13,64% serta sektor pertanian sebesar 13,63%.

b. Pertanian

- 1) Sektor pertanian sebagai kontributor terbesar perekonomian daerah didukung oleh sub sektor tanaman

pangan padi dan jagung. Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun terakhir menjadi penyangga pangan utamanya beras di Provinsi Jawa Tengah. Produksi padi selama Tahun 2001-2005 rata-rata 4,39 ton/hektar dengan luas areal produksi 72.435 hektar. Sedangkan untuk produksi jagung rata-rata 3,46 ton/hektar dengan luas areal produksi 4.558 hektar. Namun lahan pertanian cenderung turun karena terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian mencapai 2,5 hektar Tahun 2005 dan ada kecenderungan terus meningkat. Sementara untuk produktivitas lahan makin menurun karena faktor kejenuhan, menurunnya kesuburan tanah dan masih rendahnya penguasaan/penerapan teknologi.

- 2) Sub sektor peternakan yang berkembang adalah ternak sapi biasa dan domba. Perkembangan sapi biasa mencapai rata-rata per tahun 2,74% dari 29.752 ekor pada Tahun 2001 menjadi 32.838 ekor pada Tahun 2005. Sedangkan untuk domba, pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 30,05% dari 21.065 ekor pada Tahun 2001 menjadi 52.714 ekor pada Tahun 2005. Untuk populasi unggas, baik ayam ras, ayam ras pedaging, burung puyuh, angsa dan entog

mengalami peningkatan yang cukup besar. Sedangkan untuk ayam sayur mengalami kenaikan dari 2.013.265 ekor Tahun 2001 menjadi 2.406.720 ekor Tahun 2005 atau naik rata-rata per tahun sebesar 3,90%.

- 3) Sub sektor perikanan yang ada di Kabupaten Kebumen terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Untuk produksi perikanan darat meningkat dari 1.842.289 kilogram Tahun 2001 menjadi 2.032.133 kilogram Tahun 2005, dengan produksi terbesar terjadi pada area kolam dan sungai. Sedangkan perikanan laut masih perlu mendapat perhatian karena potensi Kabupaten Kebumen cukup besar dengan pantai sepanjang 57 kilometer dan didukung oleh 4 (empat) Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yaitu TPI Argopeni, TPI Karangduwur, TPI Pasir dan TPI Rowo. Jumlah kepemilikan motor tempel juga meningkat dari 711 buah Tahun 2001 menjadi 864 buah Tahun 2005. Sedangkan untuk produksi perikanan laut dari 4 (empat) TPI pada Tahun 2001 mencapai 847.315,60 kilogram dan naik menjadi 931.142,50 pada tahun 2005.

c. Industri

Sektor industri di Kabupaten Kebumen terbagi menjadi empat klasifikasi, yaitu industri besar, industri menengah, industri

kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2001 dari keempat klasifikasi industri tersebut, industri rumah tangga merupakan yang terbesar jumlahnya yaitu mencapai 96,89% atau sebanyak 35.155 unit kemudian urutan kedua industri kecil sebanyak 1.113 unit. Selama kurun waktu 2001-2005 industri rumah tangga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,1% dan industri kecil mengalami kenaikan 0,03%. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri pada Tahun 2001 sebesar 88.143 orang dan yang terbesar bekerja di sektor industri rumah tangga yaitu 75.600 orang atau 85,77%. Pada Tahun 2005, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri meningkat menjadi 89.446 orang atau naik sebesar 1,5%.

d. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun dari Tahun 2001-2005 menunjukkan kinerja yang menggembirakan hal ini ditunjukkan dari meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan rumah makan 2,38% pada Tahun 2001 menjadi 3,62% pada Tahun 2005.

e. Investasi

Sektor investasi di Kabupaten Kebumen sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk kredit Investasi dan

Modal Kerja pada Tahun 2001 sebesar Rp. 112.253.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2005 naik menjadi sebesar Rp. 292.863.000.000,00. Dengan demikian terjadi kenaikan rata-rata sebesar 32,18%. Khusus untuk kredit investasi sektor pertanian pada Tahun 2001 sebesar Rp 17.573.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2005 naik menjadi sebesar Rp. 30.772.000.000,00 atau naik rata-rata sebesar 6,15% per tahun.

f. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2005 sejumlah 389 unit yang meningkat dibandingkan Tahun 2001 yaitu sebanyak 359 unit, dengan jumlah anggota sebesar 162.880 orang pada Tahun 2001 dan meningkat menjadi 206.830 orang pada Tahun 2005.

g. Pariwisata

Obyek wisata yang sudah dikembangkan sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 10 obyek yaitu Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Pantai Petanahan, Pemandian Air Panas Krakal, Benteng Vanderwick, Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang dan situs geologi Karangsambung.

Selama Tahun 2005 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen mencapai 412.178 orang meningkat dibanding pada Tahun 2001 341.967 orang.

Dari sisi pendapatan, sumbangan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2001-2005 meningkat rata-rata sebesar 10% per tahun. Tahun 2001

Dengan demikian struktur ekonomi Kabupaten Kebumen didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dari total PDRB yaitu mencapai 37,15%. Sektor ini didukung sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen bekerja di sektor ini yang mencapai 52,85% atau 338.910 jiwa. Sektor lain yang menonjol adalah sektor industri yang tiap tahun kontribusinya selalu meningkat. Pada sektor ini didominasi oleh industri rumah tangga khususnya industri makanan olahan sebanyak 35.099 unit yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 75.410 orang. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selalu positif, namun belum cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya. Hal ini karena nilai tambah dari sektor pertanian dan industri pengolahan masih kecil/rendah.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Kebumen telah berkembang dengan cukup pesat, sejalan dengan meningkatnya ketersediaan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika. Pada Tahun 2001 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sudah mulai membangun jaringan internet. Hal ini didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi (*e-Government*). Prestasi Kabupaten Kebumen dalam penerapan *e-Government* sangat membanggakan. Dimulai pada Tahun 2003 dengan didirikannya *Press Center* yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kemudian diikuti dengan diperolehnya penghargaan *e-Government* Peringkat I untuk Kategori Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Tahun 2004. Sementara itu, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah dilaksanakan berbagai penelitian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain.

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas manusia dan kejadian alam yang menonjol adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terbesar berupa karbon dioksida yaitu mencapai

96,78%, sedangkan pencemaran udara lainnya sebesar 3,22% terdiri atas partikulat debu, nitrogen oksida, karbon monoksida, fluoride, hidrokarbon dan sulfur dioksida. Penghasil polusi terbesar adalah tungku industri, industri pengolahan dan tungku domestik. Walaupun kondisi tersebut masih belum terlalu mengkhawatirkan, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai untuk mengantisipasi perkembangan industrialisasi di masa yang akan datang.

Disamping pencemaran udara juga terdapat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik yang berakibat pada pencemaran tanah, air maupun udara. Industri pengolahan merupakan sumber pencemaran limbah cair terbesar. Limbah padat berupa sampah meliputi sampah rumah tangga maupun industri dan perdagangan menjadi bagian yang perlu dikendalikan. Selain pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi, dijumpai pula pencemaran yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak sehat.

Kabupaten Kebumen memiliki bahan galian tanah liat dan pasir yang penambangannya berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Luas hutan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2004-2007 bertambah dari 39.856,70 hektar pada Tahun 2004 menjadi 39.958,83 hektar. Luasan tersebut terdiri dari Hutan milik

Perhutani seluas 17.658,83 hektar dan Hutan Rakyat seluas 22.300 hektar.

Hutan seluas 17.658,83 hektar, terdiri atas hutan lindung 4.157,59 hektar, hutan produksi tetap 489,89 hektar, hutan produksi terbatas 12.909,22 hektar, hutan bakau 35,99 hektar dan hutan rakyat 66,14 hektar.

Kabupaten Kebumen memiliki kawasan rawan bencana, berupa tanah longsor, banjir, kekeringan dan tsunami. Kawasan rawan bencana longsor meliputi sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Buayan, Padureso, Alian, Poncowarno, Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Sempor, Karanggayam. Kawasan rawan bencana banjir terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal, Mirit, Bonorowo, Prembun, Padureso, Kutowinangun, Kebumen, Adimulyo, dan Rowokele. Sedangkan kawasan rawan bencana tsunami meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit,

Di samping itu, terdapat pula kawasan rawan gerakan tanah yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rowokele dan Sempor. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana kekeringan meliputi wilayah Kecamatan Buayan, Prembun, Alian, Poncowarno,

Pejagoan, Sruweng, Rowokele, Sempor, Karanganyar, Karanggayam dan Karangsambung.

5. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu Tahun 2001-2005 secara umum relatif terkendali. Dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum seperti unjuk rasa, huru-hara dan pelanggaran lainnya yang terjadi. Hal ini tidak lepas dari koordinasi dan kerjasama antara aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang berjalan dengan baik. Operasi-operasi yang berhubungan dengan hari-hari besar dan kejadian-kejadian darurat seperti bencana alam selalu melibatkan kerjasama antara aparat Hansip/Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Polri dan TNI. Selain itu, sarana-prasarana penunjang ketertiban dan keamanan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2001-2005 juga cukup baik, dimana jumlah pos/gardu keamanan pada Tahun 2001 sebanyak 4.005 unit meningkat menjadi 4.169 unit pada Tahun 2005.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya penciptaan keamanan dan ketertiban juga sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah hansip/linmas yang ada di masyarakat. Pada Tahun 2001, jumlah hansip/linmas yang ada sebanyak 15.020 orang dan meningkat menjadi 15.037 orang pada Tahun 2005.

Hal-hal di atas sangat menunjang terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen.

6. Hukum dan Aparatur

Produk hukum selama Tahun 2005 yang dihasilkan oleh Pemerintahan Daerah terdiri atas 36 (tiga puluh enam) buah Peraturan Daerah, 113 (seratus tiga belas) Peraturan Bupati, 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) Keputusan Bupati, 3 (tiga) Instruksi Bupati dan 27 (dua puluh tujuh) produk hukum lainnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Otonom pada Tahun 2005 sejumlah 13.013 orang. Jumlah ini turun dari angka 13.063 orang pada Tahun 2003. Fluktuasi jumlah Pegawai Negeri Sipil Otonom di Kabupaten Kebumen terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, maka jumlah tersebut telah melebihi rasio ideal jumlah Pegawai Negeri Sipil sebesar 1%.

7. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah yang dalam pengembangan kawasan prioritas bersifat strategis di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan daerah karena untuk berkembang

sangat dipengaruhi oleh perkembangan daerah sendiri dan sedikit sekali dipengaruhi oleh pusat kegiatan lainnya.

Perkembangan penduduk sangat mempengaruhi perkembangan wilayah antara lain terjadi peralihan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian.

a. Wilayah

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas : Tanah Alluvial, Tanah Latosol, Tanah Podsolik, Tanah Regosol, Asosiasi Glei Humus dan Alluvial Kelabu, Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat. Potensi tanah seperti itu menunjukkan sebagian besar wilayahnya tergolong cukup subur, sehingga dapat difungsikan sebagai lahan pertanian. Hanya beberapa bagian wilayah yang kurang mampu untuk ditanami, seperti di sebagian wilayah Kecamatan Sempor, Karanggayam, Sadang dan Kecamatan Alian.

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu :

- 1) 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%.
- 2) 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

- 3) 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.
- 4) Lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

b. Tata Ruang

Kebijaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Kebumen. Dalam struktur tata jenjang pusat-pusat pelayanan daerah, di setiap pusat pengembangan membawahi beberapa pusat kawasan pengembangan dan berfungsi melayani kawasan di sekitarnya sebagai daerah belakang (*hinterland*) terutama yang mempunyai mekanisme perekonomian yang sama. Dengan demikian pusat kawasan pengembangan akan berorientasi pada pusat wilayah pengembangan sehingga akan membentuk suatu struktur tata ruang yang kompak dan dinamis. Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

- 1) Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangan di kota Kebumen;
- 2) Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangan di kota Gombong.

Berdasarkan skalogram ketersediaan sarana dan prasarana dan analisis kemampuan gravitasi penduduk perkecamatan, untuk pengembangan kawasan yang lebih kecil maka Sub Wilayah Pembangunan tersebut dibagi dalam beberapa satuan wilayah pengembangan (swp). Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi sektor yang menonjol atau potensial. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan menjadi satuan wilayah pengembangan (swp) tersebut adalah sebagai berikut :

- swp I : Meliputi wilayah Kecamatan Kebumen, Sadang, Alian, Sruweng, Pejagoan dan Buluspesantren dengan pusatnya di Kota Kebumen. Sektor utama yang dikembangkan ; perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, pengembangan geologi Karangsambung ;
- swp II : Meliputi wilayah Kecamatan Gombong, Sempor, Kuwarasan dan Buayan dengan pusatnya di Kota Gombong. Sektor utama yang dikembangkan ; industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata;
- swp III : Meliputi wilayah Kecamatan Kutowinangun dan Ambal dengan pusatnya di Kota Kutowinangun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian dan perdagangan.

- swp IV : Meliputi wilayah Kecamatan Prembun dan Mirit dengan pusatnya di kota Prembun. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, pariwisata dan perdagangan ;
- swp V : Meliputi wilayah Kecamatan Petanahan, Puring dan Klirong dengan pusatnya di kota Petanahan. Sektor utama yang dikembangkan : pertanian, pariwisata dan perdagangan ;
- swp VI : Meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Karanggayam dan Adimulyo dengan pusatnya di kota Karanganyar. Sektor utama yang dikembangkan; pertanian dan perdagangan ;
- swp VII : Meliputi wilayah Kecamatan Ayah dan Rowokele dengan pusatnya di kota Ayah. Sektor utama yang dikembangkan pertanian, perindustrian, perikanan dan pariwisata.

Dilihat dari perspektif struktur tata ruang wilayah dan sektor utama yang dikembangkan, tampak bahwa potensi pertanian dimiliki oleh semua wilayah/kecamatan, sehingga menjadi fokus pengembangan pada semua satuan wilayah pengembangan. Sedangkan sektor unggulan berikutnya adalah perdagangan dan pariwisata ada di 6 (enam) satuan wilayah

pengembangan, sedangkan sektor perikanan ada di 1 (satu) satuan wilayah pengembangan dan industri yang masing-masing dikembangkan di 3 (tiga) satuan wilayah pengembangan. Ditinjau dari struktur wilayah, masih terdapat ketimpangan pelayanan antara Satuan Wilayah Pembangunan I dan II.

c. Pertanian

Dalam bidang pertanian yang merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga dan ditata karena mengandung nilai strategis dalam tatanan kehidupan bersosial, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pemanfaatannya, baik fungsi lindung maupun fungsi budi daya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Di Kabupaten Kebumen yang terbagi dalam 1.669.843 bidang/petak tanah dan baru 216.216 bidang/petak atau sekitar 20% yang telah bersertifikat sampai dengan tahun 2005, sehingga konflik pemanfaatan antara lain pemanfaatan fungsi lindung dengan fungsi budidaya sawah menjadi non sawah. Adapun upaya untuk pengaturan kepemilikan tanah baik Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HP) maupun permasalahan mengenai tanah terlantar dan tanah timbul terus diselesaikan inventarisasinya secara bertahap.

8. Sarana dan Prasarana

Aktivitas manusia dan pergerakan barang di Kabupaten Kebumen selama ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Diantaranya adalah keberadaan jalan/jembatan, sumber daya air, perhubungan dan sarana prasarana pelayanan dasar.

a. Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan memiliki fungsi yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Keberadaan jalan menjadi kebutuhan mutlak untuk memfasilitasi terjadinya mobilitas orang dan barang, serta pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data, jaringan jalan yang tersedia selama Tahun 2001 panjang jalan dari 610,20 km bertambah sepanjang 5 (lima) km pada Tahun 2005 menjadi 615,20 km. Tahun 2001, dilihat dari kondisinya, 423 km jalan dalam kondisi baik, 58,10 kilometer dalam kondisi sedang dan 129,10 kilometer dalam kondisi rusak. Pada Tahun 2005, jalan kondisi baik sepanjang 152,35 kilometer, sepanjang 45,5 kilometer kondisinya sedang, sepanjang 248 kilometer kondisinya rusak, dan sepanjang 164,35 kilometer rusak berat.

Pada tahun 2003 terdapat 235 buah jembatan dengan bentang jembatan bervariasi antara 6-140 meter. Total panjang

jembatan dengan panjang di atas 30 meter mencapai angka 969,95 meter.

Kabupaten Kebumen juga dilalui jalur kereta api Jawa Bagian Selatan, yang melintasi 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yaitu Rowokele, Buayan, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, Ambal dan Kecamatan Prembun dengan panjang sekitar 60 kilometer.

b. Sumber Daya Air

Sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi memiliki nilai strategis dalam menunjang produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih dan kebutuhan lainnya.

- 1) Untuk meningkatkan produktivitas hasil bumi terutama tanaman pangan khususnya di lahan persawahan yang secara produktif ditanami padi, palawija dan sayuran sangat membutuhkan aliran irigasi. Adapun jaringan irigasi yang diperlukan adalah jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, dengan bentuk bangunan permanen dan semi permanen.
- 2) Bangunan air berupa saluran induk dan sekunder yang menjamin kelancaran eksploitasi air irigasi sepanjang

375,422 kilometer, bangunan saluran tersier 560 kilometer, bangunan saluran kuartier 589 kilometer. Disamping itu telah mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan 20 bendung besar. Hal ini juga didukung oleh upaya meningkatkan kemampuan masyarakat petani dalam wadah kelembagaan Perkumpulan Petani Pengguna Air Dharma Tirta.

- 3) Sumber daya air sungai perlu dikembangkan untuk memenuhi suplai air disamping perlu diperhatikan dalam upaya pengurangan daya rusak air/banjir. Di Kabupaten Kebumen terdapat empat sub satuan wilayah sungai, yaitu Ijo, Telomoyo, Luk Ulo dan Wawar (Medono), luas total daerah aliran sungai 192.730,38 hektar dengan total volume daya tampung $\pm 6.192.427.107 \text{ m}^3$.

c. Perhubungan

- 1) Untuk transportasi di wilayah Kabupaten Kebumen telah dikembangkan beberapa trayek/rute angkutan umum. Angkutan umum tersebut dilayani oleh bus antar kota antar provinsi dan bus antar kota dalam provinsi. Untuk pemindahan atau transportasi barang mempergunakan truk, trailer, pickup dan truk box.

- 2) Ketersediaan sarana angkutan umum sebagai bagian dan sarana pelayanan dasar di 26 kecamatan berupa angkutan pedesaan. Pada Tahun 2001, sarana pengangkutan lain yang menghubungkan antar kota dengan kapasitas penumpang antara 24-55 orang terdapat di 5 (lima) kecamatan yaitu Ayah, Buayan, Kebumen, Buluspesantren dan Gombang, sedangkan bus dengan kapasitas lebih dari 55 orang terdapat hanya di Kebumen dan Gombang. Bus dengan kapasitas penumpang terbatas, antara 14-16 penumpang tersebar luas hampir ke seluruh wilayah kecamatan. Angkutan pedesaan tersebar di 22 kecamatan. Adapun wilayah yang tidak memiliki angkutan umum adalah Kecamatan Bonorowo, Padureso, Puncowarno dan Sadang.
- 3) Untuk memfasilitasi kelancaran transportasi terdapat terminal bus dan terminal non bus ada 9 (sembilan) terminal yang terdiri atas tiga buah terminal non bus tipe C, tiga buah terminal bus tipe C, dua buah Terminal bus tipe B dan sebuah terminal bus tipe A di Kota Kebumen. Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan terminal, terutama angkutan pedesaan.

d. Telekomunikasi

Sarana perhubungan lainnya berupa telekomunikasi yang difasilitasi dengan telepon. Pemanfaatan sarana telepon kabel telah tersebar luas ke seluruh wilayah. Pada Tahun 2001, penggunaan telepon kabel oleh pelanggan khususnya terdapat di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kebumen, Gombong, Kutowinangun, Karanganyar dan Prembun dengan jumlah pelanggan telepon kabel 7.584 pelanggan, pada tahun 2005 bertambah menjadi 9.481 pelanggan.

e. Sarana dan Prasarana Energi Listrik

Jumlah pelanggan di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan listrik pada Tahun 2001 sebanyak 139.239 pelanggan dengan pemakaian listrik sebesar 89.280.834 watt, pada Tahun 2005 sebanyak 164.850 pelanggan dengan jumlah pemakaian 185.118.266 watt.

f. Perumahan dan Permukiman

Ketersediaan perumahan dan permukiman yang sehat bagi masyarakat pada Tahun 2001 belum dapat terpenuhi dengan masih terdapatnya rumah kurang layak dan masih terdapat kawasan yang kondisinya kumuh.

g. Sarana dan Prasarana Air Bersih

Kondisi Kabupaten Kebumen yang memiliki daerah pegunungan menyebabkan terdapatnya daerah rawan air bersih, pada tahun 2001 terdapat kurang lebih 150 desa yang mengalami kondisi rawan air bersih, seiring dengan program air minum perdesaan, terjadi penurunan desa rawan air menjadi kurang lebih 143 desa pada tahun 2005.

Pasokan air minum di perkotaan selain menggunakan sumber air sendiri seperti sumur gali juga dilayani oleh PDAM. Pada tahun 2001 Perusahaan Daerah Air Minum sudah melayani 15.228 pelanggan dan pada tahun 2005 bertambah menjadi 15.656 pelanggan.

9. Pemerintahan dan Politik

a. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, secara administrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 (sebelas) kelurahan. Semula, jumlah Kecamatan sampai dengan Tahun 2001 sebanyak 22 kecamatan. Kemudian mulai Tahun 2002 menjadi 26 kecamatan, dengan adanya pemekaran 4 (empat) kecamatan baru yaitu Kecamatan Sadang, Padureso, Poncowarno dan Bonorowo.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kebumen mulai Tahun 2004 telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Di antaranya dengan transparansi informasi publik melalui berbagai media (cetak dan elektronik) dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Proses demokratisasi masyarakat telah berlangsung hingga pelosok desa.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (*one stop service*) terhadap 38 (tiga puluh delapan) jenis layanan perizinan sejak Tahun 2005, antara lain : Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO), Izin Penggilingan Padi, Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPDA/Kuasa Pertambangan), Izin Usaha Pengangkutan, Izin Trayek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Kepariwisata, Izin Penggunaan Stadion, Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen, Izin Pemasangan Reklame, Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Perorangan Dokter/Dokter Gigi/SP/Drg Sp, Izin Praktek Apoteker/Asisten Apoteker, Izin Praktek Bidan, Izin

Praktek Bersama Dokter/Dokter Gigi, Izin Pendirian Rumah Sakit/BP/RB, Izin Pendirian Apotik, Izin Optik, Izin Pengobatan Tradisional, Izin Laboratorium, Izin Fisioterapy, Izin Praktek Teknikes Gigi, Izin Pendirian Toko Obat, Izin Pusat Kebugaran Jasmani, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus, Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Izin Perusahaan Penyedia Jasa Buruh (*Out Sourcing*), Izin Pembuatan Tmbak, Izin Usaha Perikanan dan Izin Usaha Peternakan.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50 Tahun 2004 telah mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. Selama Tahun 2007, permohonan akta Catatan Sipil meningkat 19,7% dengan realisasi pembuatan akta kelahiran sebanyak 16.127 (enam belas ribu seratus dua puluh tujuh) buah dan dispensasi sebanyak 56.841 (lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu) buah. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk meningkat 19,3% (sembilan belas koma tiga persen), dengan realisasi 183.985 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima) buah Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan peningkatan pembuatan Kartu Keluarga mencapai 54,8% (lima puluh empat koma delapan persen) dengan realisasi

99.243 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga) buah Kepala Keluarga.

b. Politik

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, tercatat 810.350 pemilih yang tersebar di 2.995 Tempat Pemungutan Suara, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 674.771 pemilih. Hasil dari proses demokrasi ini, PDI Perjuangan memperoleh jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Kebumen dengan jumlah 19 kursi, diikuti PKB dengan 7 (tujuh) kursi, Golkar 6 (enam) kursi, serta Demokrat dan PAN yang sama-sama memperoleh 4 (empat) kursi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakatnya, pada Tahun 2005 untuk pertama-kalinya berhasil menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam suasana yang kondusif dan damai. Pemilihan Kepala Daerah tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2005 dengan jumlah pemilih sebesar 854.447. Dari jumlah tersebut, yang menggunakan hak pilihnya 612.997 pemilih atau 71,74%.

c. Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Kebumen selama Tahun 2001-2005 dapat dilihat dari besaran pendapatan

setiap tahunnya. Pada Tahun 2001, pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 320.891.439.819,00 dengan pendapatan terbesar dari Dana Perimbangan sebesar Rp 286.681.905.070,00 dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri sebesar Rp 14.216.177.913,00. Kemudian pada Tahun 2005, pendapatan daerah Kabupaten Kebumen meningkat menjadi sebesar Rp 479.950.708.435,00 dengan pendapatan terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp 419.693.616.890,00 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 31.707.791.545,00.

Pada Tahun 2001, Dana Perimbangan menyumbang 89,34% total pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah hanya berkontribusi sebesar 4,43% dari total pendapatan. Sedangkan pada Tahun 2005, kontribusi Dana Perimbangan turun menjadi 87,45%, sedangkan sumbangan Pendapatan Asli Daerah meningkat menjadi 6,61%. Dari kurun Tahun 2001-2005 tersebut, terlihat bahwa pendapatan Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, meskipun persentasenya semakin menurun. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

B. PROYEKSI KE DEPAN

Dengan memperhatikan pemaparan kondisi saat ini maka akan diperoleh gambaran yang nyata tentang perkembangan masyarakat dalam proses pembangunan daerah di masa depan. Disamping terdapat kondisi yang positif, terdapat juga perkembangan yang negatif sebagai dampak dari pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan berbagai perkiraan kondisi di masa yang akan datang.

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Melihat kondisi dan trend kependudukan saat ini, maka diperkirakan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sampai dengan Tahun 2025 akan mencapai angka 0,60%. Dengan demikian diperkirakan pada Tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen akan mencapai 1.371.921 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 1.071 jiwa/km² dan kepadatan keluarga sekitar 268 Kepala Keluarga/ km².

b. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk aspek ketenagakerjaan di sektor pertanian dan jasa lain diperkirakan akan mengalami tekanan yang cukup kuat. Sebab, jumlah tenaga kerja pada kedua sektor tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan di

sektor industri, konstruksi, angkutan dan komunikasi, serta perdagangan akan mengalami penurunan.

Diperkirakan pada Tahun 2025, Rasio penduduk usia bekerja yang bekerja dengan jumlah penduduk rata-rata sebesar 51,81%. Jumlah mata pencaharian utama akan mencapai 732.350 jiwa atau 53,19% dari jumlah penduduk. Perinciannya antara lain ; sektor pertanian sejumlah 387.219 orang atau 52,87%, sektor industri pengolahan 33.415 orang atau 4,56%, sektor konstruksi 9.688 orang atau 1,32%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 69.816 orang 9,53%, sektor angkutan dan komunikasi 8.971 orang atau 1,22%, sektor jasa-jasa 140.558 orang atau 19,19% dan sektor lainnya 82.683 orang atau 11,29%.

Untuk kegiatan transmigrasi, pada Tahun 2025 diperkirakan masih dibutuhkan mengingat pertambahan jumlah penduduk belum mencapai *zero growth*.

c. Kemiskinan

Berdasarkan data dasar dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen diproyeksikan akan turun secara bertahap mulai dari angka 30,9% pada Tahun 2006, 29,63% Tahun 2010, 15,45% Tahun 2015 dan pada akhir tahun 2025 menjadi 7,72%. Angka prediksi ini

memang masih di atas rata-rata nasional maupun provinsi namun cukup realistis mengingat tingginya kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Seperti diketahui bahwa target jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2006 sebesar 15,42% dan tidak lebih dari 5% pada Tahun 2025, sedangkan penduduk miskin provinsi sebesar 21,11% pada Tahun 2006 dan menjadi 4% pada Tahun 2025.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kebumen diprediksi akan terus meningkat yang ditandai dengan meningkatnya APM dan APK, rata-rata lama sekolah penduduk, serta tingkat pendidikan formal yang berhasil ditamatkan.

Ketersediaan sarana pendidikan secara kuantitatif telah mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat, demikian juga dengan ketersediaan guru untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sarana prasarana, kualitas guru dan kualitas proses belajar mengajar untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan akumulasi kelompok umur anak-anak dan remaja yang

masuk dalam kategori umur sekolah akan meningkat sehingga akan terjadi peningkatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dua kali lipat. Pada Tahun 2025, sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat SD sampai dengan SMA diperkirakan akan menjangkau seluruh penduduk. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun akan ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Hal ini dimungkinkan karena adanya kebijakan nasional di bidang pendidikan, yaitu penyediaan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari total anggaran, maka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan akan sangat terbuka.

e. Kesehatan

Berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen juga diperkirakan akan semakin meningkat. Angka Kematian Bayi, angka kematian Ibu Melahirkan akan semakin kecil. Sementara Angka Harapan Hidup diperkirakan akan semakin tinggi.

Kondisi Ketersediaan sarana prasarana kesehatan sangat terbatas menimbulkan permasalahan pelayanan dasar di bidang kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Kebumen yang bertipe C, belum mampu mengatasi pelayanan menyeluruh terhadap pasien. Untuk dapat meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas rumah sakit khususnya Rumah Sakit Umum Daerah dari tipe C menuju tipe B. Jangkauan pelayanan Puskesmas perlu ditingkatkan sampai ke seluruh wilayah, dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian pelayanan kesehatan menjadi semakin aksesibel. Namun demikian, dengan adanya kebijakan Kebumen Sehat maka pelayanan kesehatan pada Tahun 2025 diperkirakan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

f. Agama

Dalam bidang agama, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, damai dan saling menghormati. Namun, upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat

untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

g. Perpustakaan

Sejalan dengan semakin ketatnya perkembangan jaman dan persaingan era globalisasi, semakin menuntut tersedianya informasi dengan cepat dan mudah, sehingga keberadaan perpustakaan sebagai pusat informasi dan media belajar masyarakat memiliki peranan yang sangat besar. Pada Tahun 2025 diperkirakan peran perpustakaan akan berkembang semakin modern dengan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan 20 tahun ke depan, pemerintah akan memberikan perhatian yang serius kepada sarana prasarana, peningkatan jumlah pustakawan dan terutama penambahan jumlah koleksi perpustakaan dalam bentuk tekstual maupun visual.

h. Pemuda dan Olahraga

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, jika tidak ada akselerasi dalam pembinaan pemuda dan olahraga, maka kondisi kepemudaan dan keolahragaan akan semakin terpuruk. Diprediksi kondisi pembangunan pemuda dan

olahraga akan stagnan. Dibutuhkan upaya yang optimal untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan. Upaya yang sama dibutuhkan dalam pembibitan dan pembinaan olahraga yang lebih serius dan mengarah pada pencapaian prestasi melalui penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai dan perhatian serta penghargaan pada atlet-atlet daerah yang berprestasi.

i. Kesejahteraan Sosial

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembalian martabat kemanusiaan akan menjadi perhatian yang utama dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya ini antara lain dilakukan melalui bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan perlindungan dan fasilitasi penampungan bagi PMKS, dengan harapan kehidupan mereka ke depan menjadi lebih baik dan bermartabat.

j. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan daerah pada 20 tahun ke depan, diprediksi semakin menguat. Masuknya berbagai budaya asing dan persaingan promosi kebudayaan sebagai salah satu upaya menarik wisatawan, akan membuat perhatian pemerintah terhadap upaya pelestarian dan peningkatan kebudayaan daerah semakin gencar. Nilai-nilai budaya dan

adat-istiadat daerah, seperti budaya semangat gotong royong, akan menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam kehidupan modern yang semakin plural dan penuh tantangan.

k. Perempuan dan Anak

Berdasarkan target laporan target MDGs Tahun 2007, menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak semakin mendapat perhatian melalui program-program pembangunan yang responsif gender dan anak. Meskipun demikian, untuk kurun waktu 20 tahun ke depan, upaya peningkatan jaminan tumbuh kembang dan perlindungan anak masih membutuhkan perhatian. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan pengarusutamaan gender dan anak ini akan digalakkan melalui Gerakan Sayang Ibu dan fasilitasi Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Ramah Anak.

2. Ekonomi

a. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Berdasarkan kondisi lima tahun terakhir diketahui bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen rata-rata 3,24% per tahun (menurut harga konstan 2000). Apabila kondisi sosial ekonomi politik dianggap konstan maka dapat diprediksi bahwa Produk Domestik Regional Bruto pada Tahun 2010 sebesar 3.016.076.710.000.

Sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi sebesar 11.398.418.320.000.

Dilihat dari peranannya, diproyeksikan sektor pertanian masih akan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu 35,48% pada Tahun 2010, meskipun pada Tahun 2025 akan turun menjadi 24,53%. Penurunan peranan sektor pertanian ini akan meningkatkan peranan sektor industri pengolahan.

b. Pertanian

Sektor pertanian, khususnya padi diperkirakan akan mengalami peningkatan produksi walaupun cukup kecil yaitu sekitar 1,03% per tahun. Untuk produksi jagung meningkat 3,0% per tahun. Di sub sektor tanaman perkebunan, produksi kelapa diperkirakan naik 2,8%, sedangkan produksi tanaman pandan akan naik 10%. Hal ini terjadi karena kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta mempunyai prospek pasar yang baik. Sub sektor peternakan akan mengalami peningkatan, di antaranya dengan kenaikan populasi ternak sapi sebesar 1,69%, ternak domba 11,65% dan unggas 1,87%. Selain itu, sub sektor perikanan

khususnya perikanan darat diperkirakan meningkat 12,94% dan perikanan laut meningkat 18%.

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani menjadi isu penting dan harus menjadi prioritas pembangunan melalui kemudahan akses pemberian kredit. Hal ini untuk menjaga agar petani tidak beralih menanam tanaman lain atau menjual tanah pertanian sebagaimana tren yang tengah terjadi di beberapa daerah. Kebijakan tersebut harus diikuti dengan koordinasi yang sinergis antara beberapa instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan perbankan.

c. Industri

Sektor industri di Kabupaten Kebumen diperkirakan masih didominasi oleh sektor industri kecil dan rumah tangga, walaupun ada peningkatan pada jumlah industri kecil dan menengah. Hal ini didukung oleh semakin terbukanya akses terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi.

d. Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Kebumen diperkirakan akan menunjukkan kinerja meningkat. Hal ini didukung dengan sarana prasarana perdagangan yang semakin memadai.

e. Investasi

Proyeksi investasi di Kabupaten Kebumen pada masa mendatang akan semakin meningkat didukung dengan proses perizinan yang semakin mudah, infrastruktur yang semakin memadai, keamanan yang semakin kondusif serta kepastian hukum menyangkut investasi.

f. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kelembagaan dan jumlah koperasi diperkirakan akan berkembang semakin luas sesuai kebutuhan para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga semakin berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah akan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

g. Pariwisata

Kepariwisataan diprediksi akan semakin berkembang dan mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan

kerja sebagai efek dari bertambahnya jumlah kunjungan dan promosi pariwisata yang semakin mendunia. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai salah satu wilayah wisata alam dan bahari secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diprediksi mengalami peningkatan. Di sektor Pemerintah, hal ini ditandai dengan diaplikasikannya layanan *e-Government* pada seluruh SKPD di Kabupaten Kebumen. Sementara di sisi lainnya, masyarakat dan dunia usaha melalui hasil temuan teknologi tepat guna akan semakin mampu memanfaatkan berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat akan semakin meningkat.

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mempergunakan kendaraan dengan emisi gas buang yang sangat polutif, buang air besar melalui sungai yang

mencapai 25,62% penduduk, dan pembuangan sampah yang tidak tertib. Faktor lain adalah perilaku industri, yang banyak mengeluarkan produk pembuangan limbah secara besar-besaran. Limbah tersebut dapat berupa limbah cair, padat maupun gas. Industri pengolahan merupakan sumber pencemaran limbah cair terbesar. Pencemaran limbah cair sangat besar dibandingkan dengan bentuk pencemaran lainnya, yaitu mencapai 95,54% (sembilan puluh lima koma lima puluh empat persen). Beban limbah padat pada Tahun 2004 adalah 293.037.857 ton/tahun. Limbah padat berupa sampah meliputi sampah rumah tangga maupun industri dan perdagangan menjadi bagian yang harus dikendalikan. Total produksi sampah dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2004 adalah sebesar 642.620 ton/jiwa/tahun. Seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri akan terjadi peningkatan produksi limbah yang dikeluarkan. Untuk kepentingan pengembangan, satuan wilayah pengembangan khususnya perdagangan dan industri hendaknya disertai dengan instalasi pembuangan dan pengolahan limbah, dan manajemen limbah secara profesional, dalam pengelolaan limbah menggunakan sistem 3 R (*reduce reuse dan recycling*). Sehingga sampah dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan potensi bahan galian perlu memperhatikan metode penambangan yang benar dan menjadi perusahaan penambangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

5. Keamanan dan Ketertiban

Potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diperkirakan akan semakin kompleks. Namun demikian, hal ini akan bisa diatasi dengan semakin baiknya tingkat profesionalisme aparat keamanan di daerah. Sementara itu, tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga semakin tinggi. Kerjasama yang semakin apik antara aparat dan masyarakat juga semakin mendorong terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif dalam kehidupan masyarakat.

6. Hukum dan Aparatur

Dukungan sumber daya manusia khususnya jumlah Pegawai Negeri Sipil hingga Tahun 2025 diperkirakan sebanyak 1% dari jumlah penduduk, dengan kapasitas dan produktivitas yang semakin baik. Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, responsif, serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Era globalisasi juga harus dijawab oleh aparatur

pemerintahan yang kreatif dan inovatif dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.

7. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan

- a. Kondisi geografis yang mencakup topografi dan klimatologi ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan. Namun untuk wilayah dengan kemiringan 41% ke atas yang luasnya sekitar 33.294,6 hektar apabila tidak ada usaha serius oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan, maka hal tersebut akan memperluas wilayah rawan longsor.
- b. Adanya rencana Pemerintah untuk membangun Jalur Jalan Lintas Selatan yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen akan berdampak terjadi perubahan penggunaan lahan, meningkatnya aktivitas orang dan membuka peluang untuk mengembangkan sektor jasa dan perdagangan di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya.
- c. Adanya kecenderungan perubahan pemanfaatan lahan dari hutan lindung dan kawasan pertanian menjadi permukiman, pusat-pusat pelayanan, pengembangan jasa dan industri akan berpengaruh dalam penetapan Sub Wilayah Pembangunan

dan satuan wilayah pengembangan. Perubahan pola penggunaan lahan tersebut dapat mengubah:

- 1) luas lahan yang tersedia untuk pengembangan setiap sektor;
- 2) volume pengembangan setiap sektor; dan
- 3) pergeseran antar sektor antara (transisional).

Pada Tahun 2025 diprediksi, hampir semua tanah pertanian produktif di tepi jalan raya beralih fungsi penggunaannya ke non pertanian.

- d. Lahan sawah yang menjadi kawasan sangat potensial mengalami perubahan fungsi. Selama ini peruntukan kawasan perdagangan, fasilitas kota, dan permukiman selalu berorientasi pada pemanfaatan sawah untuk kepentingan pemekaran. Karena itu, perlu keseimbangan dalam pemanfaatan sawah dalam mengembangkan pusat-pusat pengembangan di luar bidang pertanian. Sebab, dalam 5 (lima) tahun terakhir, lahan sawah mengalami penyempitan sebesar 0,01%. Sementara untuk permukiman, hutan negara, dan tanah-tanah lainnya tidak mengalami perubahan *significant*. Tanah penggembalaan justru mengalami peningkatan sebesar 0,02% dan lahan yang ditanami tanaman

kayu-kayuan meningkat 0,4%. Luas tanah yang tidak diusahakan menurun sebesar 0,4%.

- e. Dilihat dari perspektif struktur tata ruang wilayah dan sektor utama yang dikembangkan maka terjadi pemusatan pelayanan pada koridor 2 (dua) kota yakni Kebumen dan Gombong sehingga untuk mendukung perkembangan wilayah membutuhkan pusat Satuan Wilayah Pembangunan baru di Kota Prembun. Dengan demikian maka Satuan Wilayah Pembangunan akan menjadi 3 (tiga) dengan pusat masing-masing di Kebumen, Gombong dan Prembun. Dengan adanya kecenderungan perubahan lahan, maka pengembangan Sub Wilayah Pembangunan dan satuan wilayah pengembangan akan mengalami perubahan. Dengan terjadinya pemekaran kota juga semakin mendesak lahan terbuka untuk pertanian. Untuk itulah pengembangan Sub Wilayah Pembangunan dan satuan wilayah pengembangan bidang pertanian akan mengalami kesulitan jika mempergunakan pendekatan ekstensifikasi lahan, sehingga dalam jangka panjang diperlukan pendekatan intensifikasi/diversifikasi pertanian. Untuk pengembangan Sub Wilayah Pembangunan dan satuan wilayah pengembangan khususnya dalam bidang perikanan, yang

masih terkonsentrasi pada satuan wilayah pengembangan I dan V perlu diperluas. Pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan air laut dan air tawar diperlukan. Pada wilayah sepanjang pesisir pantai Selatan diarahkan untuk menjadi pusat pengembangan budidaya tambak, pelabuhan nelayan dan pasar ikan. Pengembangan dan pemberdayaan kampung-kampung nelayan menjadi kebutuhan utama. Sebagai penunjang utama berkembangnya wilayah pertanian, perlu dikembangkan sektor perdagangan dan industri. Sektor perdagangan diarahkan untuk pemasaran hasil produksi pertanian. Sedangkan sektor industri dikembangkan untuk pengolahan hasil-hasil produksi pertanian sehingga menciptakan nilai tambah bagi produk tersebut.

f. Kondisi peruntukan lahan pada tahun 2025 diperkirakan sebagai berikut:

1) Peruntukan Lahan sebagai Sawah

Luas tanah sawah akan mengalami penyusutan terus-menerus baik karena konsentrasi penduduk, pengembangan fasilitas kota dan pengembangan sektor lain. Berkurangnya luas areal sawah sangat menentukan penurunan konsentrasi satuan wilayah pengembangan bidang pertanian.

Penyusutan lahan sawah dalam lima tahun terakhir sebesar 0,01%, maka diperkirakan pada periode 2005-2010 sebesar 0,02%, periode 2010-2015 sebesar 0,04%, periode 2015-2020 sebesar 0,08% dan periode 2020-2025 mencapai 0,16%.

Dengan persentase penyusutan konstan sebesar 0,01% diproyeksikan dalam 20 tahun ke depan lahan sawah mengalami penyempitan minimal 29,85 hektar. Mengingat perhitungan ini menggunakan angka konstan maka hanya bisa menentukan proyeksi penyempitan lahan secara minimal. Sedangkan proyeksi maksimal luas penyusutan lahan selama 20 tahun dapat mencapai 212,40 hektar bila tidak dilakukan kebijakan pengendalian pengembangan sektor lain yang merubah fungsi lahan sawah.

2) Peruntukan Lahan Permukiman

Bila pertumbuhan penduduk 0,60% per tahun, maka pada Tahun 2010 diperkirakan menjadi 1.254.179 jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 1.292.259 jiwa, Tahun 2020 sebanyak 1.331.494 jiwa dan Tahun 2025 diperkirakan 1.432.308 jiwa. Jika dilihat, luas wilayah yang digunakan untuk permukiman dibandingkan dengan

jumlah penduduk pada Tahun 2007 adalah 35.985 hektar untuk 1.231.872 jiwa maka konsentrasi permukiman untuk setiap penduduk adalah 0,03 hektar/jiwa. Apabila diasumsikan pertumbuhan penduduk Tahun 2007-2025 sebesar 0,6%, maka diperkirakan pada Tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen akan bertambah menjadi 1.432.308, yang berarti daya dukung wilayah untuk permukiman masih memadai.

3) Peruntukan Lahan untuk Lainnya

Pemanfaatan lahan terdiri atas hutan negara, tanah tegalan tanaman kayu-kayuan, tambak kolam dan tanah yang tidak diusahakan. Untuk hutan negara harus dipertahankan sebagai sumber potensi konservasi lahan dan air tanah. Sedangkan tanah tegalan serta tanaman kayu-kayuan dan kolam atau tambak dapat ditingkatkan dengan menggunakan lahan yang belum diusahakan. Ke depan perlu dilakukan ekstensifikasi dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan budidaya perikanan. Untuk peningkatan budidaya tambak dan perikanan tersebut dapat memanfaatkan pantai sepanjang pesisir untuk budidaya tambak.

8. Sarana dan Prasarana

a. Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan data yang ada, pada Tahun 2010 konstruksi jalan beraspal di atas 95% dan jalan berfungsi dengan baik 45%, dan diharapkan kondisi jalan rusak berat pada Tahun 2025 menjadi 0%. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal (pertanian) diperlukan dukungan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Daerah pertanian di sepanjang pantai selatan serta desa-desa di pedalaman membutuhkan fasilitas jalan yang menghubungkan desa-kota. Pengangkutan hasil laut dan hasil pertanian dapat dilakukan dengan tersedianya jalan dan jembatan yang mencukupi. Sedangkan untuk kepentingan pemekaran kota, perkembangan industri dan perdagangan menjadi alasan penting untuk meningkatkan panjang dan mutu jalan.

b. Irigasi

Keberadaan irigasi yang memadai menjadi kebutuhan pokok di wilayah pertanian. Tuntutan peningkatan produksi pertanian searah dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk tersebut harus diimbangi oleh ketersediaan bahan pangan. Dengan lahan yang cenderung menyempit dari waktu ke waktu menjadikan produksi agregat mengalami penurunan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem irigasi teknis yang lebih terkoordinir, suplai air yang cukup, jaringan irigasi yang berkualitas dan mampu mensuplai air ke persawahan secara merata.

c. Perhubungan

Untuk transportasi di wilayah Kabupaten Kebumen sampai tahun 2010 tersedia antara 47-50 rute angkutan umum. Angkutan umum tersebut dilayani oleh bus antar kota antar provinsi dan bus antar kota dalam provinsi. Untuk pemindahan atau transportasi barang mempergunakan truk, trailer, pickup dan truk box.

Ketersediaan sarana angkutan umum sebagai bagian dan sarana pelayanan dasar di 26 kecamatan berupa angkutan pedesaan. Sarana pengangkutan lain yang menghubungkan antar kota dengan kapasitas penumpang antara 24-55 orang terdapat di 8 (delapan) kecamatan yaitu Ayah, Buayan, Puring, Padureso, Sempor, Kebumen, Buluspesantren dan Gombong, sedangkan bus dengan kapasitas lebih dari 55 orang terdapat hanya di Ayah, Kebumen dan Gombong. Bus dengan kapasitas penumpang terbatas antara 14-16 penumpang tersebar luas hampir ke seluruh wilayah kecamatan. Angkutan pedesaan tersebar di 22 kecamatan.

Adapun wilayah yang tidak memiliki angkutan umum adalah Kecamatan Bonorowo, Padureso, Puncowarno dan Sadang. Prasarana perhubungan seperti terminal pada Tahun 2010 diprediksi tidak akan berubah. Untuk memfasilitasi kelancaran transportasi terdapat terminal bus dan terminal non bus ada 9 (sembilan) terminal yang terdiri atas tiga buah terminal non bus tipe C, tiga buah terminal bus tipe C, dua buah Terminal bus tipe B dan sebuah terminal bus tipe A di Kota Kebumen. Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan terminal, terutama angkutan pedesaan. Hal ini perlu dibenahi sehingga pada tahun 2025 akan terwujud sistem dan manajemen transportasi lokal yang ideal.

d. Telekomunikasi

Telekomunikasi minimal menyangkut telepon kabel, radio, televisi dan internet. Pemanfaatan sarana telepon kabel telah tersebar luas ke seluruh wilayah, khususnya terdapat di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kebumen, Gombang, Kutowinangun, Karanganyar dan Prembun dengan jumlah pelanggan mencapai 10.949 sambungan telepon kabel. Di samping telepon kabel telah berkembang luas penggunaan telepon seluler. Di samping itu, juga ada stasiun radio (lokal)

sebanyak 7 (tujuh) stasiun dan sebuah stasiun Televisi Lokal di Kabupaten Kebumen dengan *coverage area* yang menjangkau seluruh wilayah.

Pada Tahun 2025, diharapkan seluruh wilayah telah terjangkau jaringan komunikasi telepon (kabel dan seluler), siaran radio dan televisi. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi-komunikasi, khususnya internet maka pada tahun 2025 internet sudah menjangkau ke seluruh desa.

e. Perumahan dan Permukiman

Melihat kondisi saat ini dan proyeksi pertumbuhannya, maka Tahun 2025 diharapkan sebagian besar masyarakat telah mempunyai rumah sehat dan layak huni, dan kurang dari 7,72% penduduk yang belum memiliki rumah sehat dan layak huni.

f. Sarana dan Prasarana Energi Listrik

Melihat kondisi saat ini dan meningkatnya kebutuhan energi listrik serta kebijakan nasional di bidang energi listrik, maka pada Tahun 2010 diprediksi jumlah pelanggan bertambah menjadi 191.318 pelanggan dengan pemakaian listrik 180.252.098 watt, yang menjangkau 208.490 kepala keluarga. Diperkirakan permintaan sambungan listrik ke rumah-rumah dan tempat usaha ini akan terus meningkat

sejalan dengan kebutuhan penduduk. Bila ditinjau dari tingkat jangkauan layanan listrik, maka seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen sudah terjangkau listrik, sehingga diharapkan pada Tahun 2025 seluruh dukuh/dusun akan terjangkau aliran listrik.

g. Sarana dan Prasarana Air Bersih

Data tahun 2005 menunjukan jumlah desa yang memiliki sarana dan prasarana air bersih perdesaan sebanyak 83 desa di 17 wilayah kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terlayani 5.846 kepala keluarga, sedangkan dari Perusahaan Daerah Air Minum sudah melayani 14 kecamatan dengan 79.880 pelanggan.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air berkualitas sangat bersih sebanyak 17.316 Kepala Keluarga atau 5,99%. Rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih sebanyak 194.740 Kepala Keluarga atau 67,42%, dan rumah tangga yang mengkonsumsi air kurang bersih sebanyak 76.796 Kepala Keluarga atau 26.59%.

Diharapkan, jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi air sangat bersih terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Sebab, produksi air bersih belum cukup memenuhi

kebutuhan distribusi yang berimplikasi pada kuantitas air yang didistribusikan kepada konsumen relatif kurang. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kecepatan pada sistem distribusi sehingga terjadi akumulasi kotoran di jaringan yang mengakibatkan menurunnya kualitas air disamping tingkat cakupan pelayanan yang masih rendah.

9. Pemerintahan dan Politik

- a. Fakta yang ada menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk masih tergolong amat rendah yaitu hanya sekitar 18% dari keseluruhan penduduk yang berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kepemilikan kartu keluarga baru sekitar 24%. Begitu pula untuk kepemilikan akte kelahiran masih rendah. Untuk itu, sejalan dengan kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan Pemerintah di bidang kependudukan, maka persentase kepemilikan dokumen kependudukan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada Tahun 2025 diharapkan 100% penduduk telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- b. Jumlah jenis pelayanan perizinan pada Tahun 2005-2025 diperkirakan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai penyedia layanan perizinan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan.

- c. Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, telah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif dan memuaskan.
- d. Kebutuhan belanja pembangunan sampai dengan Tahun 2025 diperkirakan semakin meningkat. Bila pada tahapan lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih kurang dari 1 (satu) trilyun rupiah, maka pada periode berikutnya diperkirakan mencapai lebih dari 1 (satu) trilyun rupiah. Kemampuan dan kemandirian Daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan diharapkan dapat ditingkatkan kontribusinya. Komponen Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus naik proporsinya, dengan angka pertumbuhan rata-rata 1,8% per tahun, sehingga 20 tahun ke depan, ketergantungan pada alokasi dana perimbangan dapat berkurang.
- e. Di bidang politik, diperkirakan kesadaran politik masyarakat akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kondisi

sosial-ekonomi penduduk. Namun, hal ini tidak secara serta-merta dimaknai dengan peningkatan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pemaparan kondisi umum daerah sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II menghasilkan beberapa kesimpulan pokok yang selanjutnya menjadi bahan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Kebumen. Hasil analisis ini akan menghasilkan sejumlah isu dan dengan indikator tertentu akan terpilih sejumlah isu strategis.

A. POTENSI

1. Struktur perekonomian Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sektor pertanian memberi kontribusi paling besar terhadap PDRB yakni 37,15%, termasuk di dalamnya adalah sub sektor tanaman bahan makanan antara lain singkong, jagung dan kacang tanah, sub sektor perkebunan antara lain kelapa, pandan dan tembakau, sub sektor peternakan antara lain sapi, kambing dan unggas. Sektor pertanian ini ditopang oleh jenis tanah subur yang cocok untuk pertanian seperti tanah alluvial, latosol, podsolik, regosol, asosiasi, glei humus dan alluvial kelabu, asosiasi litosol dan mediteran coklat. Potensi besar ini memberi ciri khas Kabupaten Kebumen sebagai wilayah yang

perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Wilayah ini juga memiliki topografi yang lengkap mulai dari wilayah pantai, dataran rendah, dataran sedang dan pegunungan. Sebagian besar penduduknya tetap mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.

2. Banyaknya industri rumah tangga yang mengolah hasil-hasil pertanian antara lain lanting, gula, sabut kelapa, anyaman pandan, emping, bambu dan sebagainya semakin mempertegas ciri Kabupaten Kebumen sebagai wilayah industri produk pertanian. Industri rumah tangga ini yang mencakup industri kecil yang jumlahnya mencapai 1.185 buah, dan industri kerajinan rumah tangga yang mencapai 35.099 buah. Industri rumah tangga ini terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, serta tidak mudah tergoyahkan oleh krisis ekonomi yang menggoncangkan perekonomian nasional karena berbahan baku lokal.
3. Tersedianya dua waduk yakni Sempor dan Wadaslintang dan sumber mata air lainnya yang mampu mengairi 35.350 hektar sawah. Potensi sumber daya air seperti ini memberi keuntungan besar bagi petani untuk menopang keberlangsungan pertaniannya sekalipun pada saat musim kemarau.

4. Potensi khas sektor perekonomian Kabupaten Kebumen lainnya adalah walet. Nilai ekonomis walet ini cukup tinggi karena pasarnya skala nasional dan internasional. Jika dikelola dengan prinsip pasar yang baik akan memberi kontribusi besar baik bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya.
5. Posisi geografis dengan wilayah yang strategis, yakni di jalur jalan lintas Selatan Jawa Tengah yang dapat memberi keuntungan ekonomis, dan memudahkan aksesibilitas pengangkutan orang dan barang dari dan ke Kabupaten Kebumen. Posisi ini juga memberi keuntungan bagi berlangsungnya proses perekonomian di sepanjang jalur jalan lintas selatan tersebut, termasuk berlangsungnya proses-proses produksi seperti industri manufaktur yang banyak mengandalkan pada lokasi strategis untuk memperoleh keuntungan pasar.
6. Partisipasi masyarakat yang tinggi dengan masih kuatnya kebiasaan gotong royong di pedesaan. Ciri khas budaya asli Indonesia ini belum banyak tergerus oleh perubahan zaman sehingga secara sadar telah menjadi pola penjaminan sosial di tingkat pedesaan. Hal ini akan menguntungkan pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kebumen karena penilaiannya

tidak hanya dari sisi pasar semata tetapi juga ditopang oleh prinsip-prinsip hubungan sosial dan budaya masyarakatnya.

7. Meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan penduduk dari rata-rata sebelumnya berpendidikan Sekolah Dasar/ sederajat menjadi rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat. Pada Tahun 2000, rata-rata jumlah penduduk berpendidikan dan tidak tamat Sekolah Dasar/ sederajat 77,96% kemudian turun menjadi 76,4% pada Tahun 2004. Angka ini semakin diperkuat dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berpendidikan minimal SMP/ sederajat dengan rata-rata 22,04% per tahun. Perubahan ke arah yang positif memberi kontribusi besar bagi peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen.
8. Derajat kesehatan penduduk juga menunjukkan peningkatan sekalipun angka peningkatannya tidak terlalu signifikan. Hal ini ditandai dari meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 68,7 pada Tahun 2005 menjadi 69,1 pada tahun 2007, menurunnya Angka Kematian Ibu dari 59,71% pada Tahun 2005 menjadi 51,27% Tahun 2007. Demikian juga Angka Kematian Bayi turun dari 9,25% pada Tahun 2005 menjadi 6,77% Tahun 2007.
9. Tersedianya media komunikasi dan promosi khususnya keberadaan radio dan televisi lokal di Kabupaten Kebumen.

Kendati keberadaan stasiun televisi ini cukup memberatkan anggaran, tetapi keuntungan yang diperoleh jika dimanfaatkan secara tepat akan bermanfaat sebagai media marketing bagi produk-produk dan pencitraan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah yang strategis dan mendorong transparansi pemerintahan menuju terciptanya *good local governance*.

10. Tingginya keterlibatan *civil society* (Lembaga Swadaya Masyarakat, media, akademisi, masyarakat) yang didukung Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik, untuk berpartisipasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong terciptanya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

B. KENDALA

1. Jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2006 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 30,9% dari jumlah penduduk atau 370.970 jiwa. Angka tersebut menduduki peringkat ke 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Bahkan data untuk usulan Bantuan Langsung Tunai, pada tahun yang sama menunjukkan jumlah yang lebih besar lagi yakni 48,8% (empat puluh delapan koma delapan persen) dari jumlah penduduk. Besarnya jumlah

orang miskin di Kabupaten Kebumen akan sangat berpengaruh besar terhadap produktivitas dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan.

2. Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi. Penduduk usia kerja selama Tahun 2000-2004 meningkat rata-rata 3,88% per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik 66,77% Tahun 1999 menjadi 67,48% Tahun 2003. Dengan demikian, mereka yang tidak terserap lapangan kerja masih cukup besar. Sehingga hal ini akan menimbulkan kerawanan sosial.
3. Sektor perikanan laut yang masih terbelakang baik dari sisi teknologi maupun kapasitas ekonomi nelayan. Nelayan masih bersifat tradisional dan armada kapal masih kapal kecil. Sektor perikanan laut ini baru mampu dikelola kurang lebih 2% dari potensi lestari. Kondisi Laut Selatan memang tidak memungkinkan para nelayan dengan mudah melakukan eksplorasi perikanan karena ombak yang besar dan sebagian besar dari para nelayan tersebut adalah nelayan tradisional. Kesulitan melakukan eksplorasi penangkapan ikan itu disebabkan kondisi alam dan belum tersedianya pelabuhan perikanan dan armada kapal yang memadai.
4. Pengembangan bisnis dari industri rumah tangga terkendala oleh pola manajemen bisnis yang masih tradisional. Hal ini

diperlihatkan antara lain belum adanya sistem pembukuan yang baku. Pola ini menghambat aksesibilitas industri rumah tangga tersebut untuk memperoleh modal sehingga produk kurang bisa bersaing dan kurang menjangkau pasar global.

5. Infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan belum memadai khususnya aksesibilitas ke wilayah perdesaan di pegunungan. Masih terdapat jalan sekitar 40 kilometer yang mengurangi aksesibilitas orang dan barang dari dan ke pedesaan. Kondisi ini menciptakan situasi yang tidak kondusif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah pegunungan.
6. Kapasitas Pemerintahan Daerah **dan** pemerintahan desa yang belum optimal. Penilaian terhadap kapasitas tidak dinilai dari rata-rata tingkat pendidikan tinggi yang diraihinya, tetapi pada performansi aparat Pemerintahan Daerah secara keseluruhan yang masih rendah. Hal ini karena budaya organisasi yang belum mendorong kinerja, dan juga pada faktor-faktor sistem dan struktur organisasi yang cenderung menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas.
7. Kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang belum optimal, termasuk kualitas sumber daya manusia gurunya, dimana Angka Kelayakan Guru Mengajar (kesesuaian ijazah) sampai dengan tahun 2005, untuk

jenjang Sekolah Dasar kesesuaian ijazah sebesar 79,49%, untuk Sekolah Menengah Pertama sebesar 64,50%, untuk Sekolah Menengah Atas sebesar 83,40% dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 71,07%. Apabila dilihat dari aspek komposisi antara guru yang mengajar bidang ilmu eksak dibandingkan dengan guru yang mengajar bidang non eksak termasuk guru dibidang agrobisnis belum seimbang, dimana komposisi untuk sekolah negeri : jenjang Sekolah Menengah Atas dari 450 orang guru, terdiri dari 305 orang guru non eksak atau sebesar 67,8% dan sisanya sebanyak 145 orang guru eksak atau sebesar 32,2%; jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dari 252 orang guru, terdiri dari 134 orang guru non eksak atau sebesar 53,2% dan sisanya sebanyak 118 orang guru eksak atau sebesar 46,8%. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi kualitas belajar-mengajar di sekolah.

8. Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai khususnya di wilayah pegunungan. Keberadaan 35 pusat kesehatan masyarakat dan 74 pusat kesehatan masyarakat pembantu belum dapat memberikan pemerataan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas. Disamping itu pembiayaan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin masih menghadapi kendala.

9. Perilaku hidup masyarakat yang belum bersih. Pola kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan tidak adanya jaminan sanitasi telah mendorong berbagai jenis penyakit endemik seperti malaria dan demam berdarah.
10. Belum optimalnya jejaring (*networking*) kebijakan antara pemerintah, swasta dan *civil society*. Ada kecenderungan bahwa masing-masing pihak berdiri pada posisi yang berhadapan ketimbang pada posisi kemitraan. Dari sisi politis, memang akan memperkuat kontrol antar aktor, tetapi sisi lain akan mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan dan dampak akhirnya pada hasil akhir pembangunan.
11. Kinerja pelayanan publik yang belum optimal. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah khususnya untuk bidang pemerintahan umum misalnya; perizinan, pelayanan catatan sipil dan jenis pelayanan lain yang masuk dalam *One Stop Services*, sehingga masih terjadi ketidakpuasan masyarakat dalam layanan publik.
12. Peran perempuan dalam ranah publik yang belum optimal. Dengan kata lain, gender masih sebatas sebagai wacana dan belum menjadi sebuah parameter kebijakan.

13. Belum adanya pemetaan produk unggulan dan potensi investasi khususnya di bidang agrobisnis.

C. PELUANG

1. Permintaan produk pertanian yang meningkat di pasar nasional, regional dan internasional. Kenaikan ini antara lain dipicu oleh naiknya harga Bahan Bakar Minyak di tingkat dunia yang mendorong banyak negara melakukan diversifikasi sumber bahan bakarnya, tidak saja dari minyak bumi tetapi juga dari sumber-sumber nabati. Pengalihan sumber ini memberi prospek yang positif bagi pengembangan produk-produk pertanian. Hal ini didukung factor produksi tenaga kerja yang murah.
2. Semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa antara lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini menguasai Jawa akan mengalami kejenuhan sehingga diperkirakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan bermunculan termasuk di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kondisi ini diproyeksikan akan memberi arah perkembangan ekonomi yang positif bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi *satelit* dari berbagai kota besar khususnya Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan dan jalur penghubung ke daerah lain (Kabupaten Banjarnegara,

Wonosobo dan Pekalongan) akan sangat membantu perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Kebumen.

3. Berkembangnya sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata termasuk agro wisata dan wisata alam yang diperkirakan akan menjadi penarik perkembangan sektor lainnya. Globalisasi telah mendorong mobilitas orang yang tinggi antar negara sehingga (terkesan) tidak ada lagi batas antar negara (*borderless state*). Salah satu wujudnya adalah di sektor pariwisata yang telah menjadi bagian industri tak terpisahkan dari sektor perekonomian lainnya. Bahkan karakter industri pariwisata yang unik diproyeksikan akan mampu menarik ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*) berbagai industri lainnya untuk menyediakan kebutuhan pariwisata antara lain industri cindramata dan makanan kecil. Terkait dengan berkembangnya industri pariwisata, Kabupaten Kebumen secara geografis diuntungkan karena dekat dengan salah satu ikon wisata di Indonesia yakni Yogyakarta. Posisi ini diperkirakan akan memberi pengaruh positif bagi Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan objek wisatanya maupun penghasil produk untuk mendukung pariwisata termasuk menarik sarana perjalanan wisata yang semakin meng-*global*.

4. Adanya persaingan pasar bebas dunia dan selera yang mendunia. Produk-produk internasional akan banyak masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Hal ini sekaligus merupakan peluang untuk menjadikan produk lokal bisa menembus pasar internasional.
5. Berkembangnya sistem teknologi informasi. Kecanggihan teknologi informasi telah menembus batas wilayah administratif, bahkan sistem politik dan ekonomi negara. Sistem ini adalah peluang yang sangat besar dan murah untuk menciptakan *images* positif Kabupaten Kebumen dan sekaligus memanfaatkannya untuk menarik investor nasional dan internasional. Pada level internasional kecanggihan teknologi ini juga mendorong kepemilikan perusahaan terpusat secara global ketimbang terpusat secara nasional.
6. Adanya peningkatan persaingan baik produk primer, olahan dan jasa, maupun persaingan di pasar input (faktor produksi) memberi peluang untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen karena tersedia tenaga kerja trampil yang murah untuk mengisi lapangan kerja sektor industri.
7. Otonomi daerah telah mendorong daerah-daerah yang berada di satu kawasan terdekat untuk membangun kerjasama antar

daerah *networking* yang saling melengkapi dan menguntungkan, sehingga dengan adanya kerjasama antar daerah akan meningkatkan daya saing daerah.

D. TANTANGAN

1. Pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang sangat cepat tetapi belum diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Sekalipun beberapa tahun terakhir terjadi penurunan angka kelahiran, namun diperkirakan masih akan terjadi kenaikan angka kelahiran (*baby boom*) kembali di masa datang. Penyebabnya adalah program Keluarga Berencana belum menjadi prioritas program sehingga diperkirakan memberi dampak besar pada kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran anaknya.
2. Perubahan tata guna lahan dari sawah/hutan produktif ke pemukiman yang meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan menciptakan permintaan lahan semakin meningkat pula untuk memenuhi kebutuhan perumahan khususnya dan kawasan permukiman pada umumnya.
3. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat sebagai akibat langsung dari kesadaran berdemokrasi dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat telah mendorong kontrol dari

masyarakat yang jauh lebih besar pada proses-proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.

4. Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis berimbas pula pada sistem ekonomi karena peran pasar semakin menguat dalam penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Sebaliknya, peran negara semakin menurun dan semakin tergantikan oleh peran swasta melalui strategi privatisasi. Pergeseran fungsi dari peran pembangun menjadi fasilitator memberi tantangan bagi pemerintah untuk menengok kembali tugas pokok dan fungsinya selama ini. Struktur yang sederhana dengan fungsi yang sangat efektif dalam menjalankan tugas adalah pilihan yang sangat diharapkan masyarakat.
5. Stabilitas perekonomian dunia yang terganggu sebagai akibat tidak terkendalinya harga minyak diperkirakan masih akan terjadi di masa-masa datang. Kondisi ini berimbas pada ketidakstabilan perekonomian daerah dan terutama pada ketidakpastian produksi dan kemampuan daya beli masyarakat.
6. Biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum *pro-poor*. Kendati telah ada upaya pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) untuk memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin, namun subsidi tersebut belum

mampu mengimbangi kenaikan biaya untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

7. Pencemaran udara dan limbah domestik akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kemungkinan banyaknya industri yang menjalankan operasi produksinya di daerah. Bahkan untuk kondisi sekarang pun sudah dihadapkan dengan masalah kerusakan lingkungan alam, yakni dengan berkurangnya daya dukung lingkungan sehingga mengancam ketersediaan air bersih dan air untuk irigasi.

E. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis atas kekuatan, kendala, peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut ini akan dijelaskan sejumlah isu strategis yang sebelumnya telah dianalisis dan dipilih dengan alat bantu *Litmus Test*. Isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan.

Isu ini sangat strategis karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia yang menjadi faktor utama dalam proses pembangunan termasuk proses pengaturan jumlah kelahiran, dan peningkatan produksi daerah. Selama angka kemiskinan belum bisa diminimalisir, maka akan selalu menjadi beban bagi daerah sehingga selayaknya masalah ini menjadi prioritas utama.

2. Penciptaan lapangan kerja

Isu tentang kemiskinan sangat terkait dengan tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup khususnya di sektor formal. Sektor informal pun pada akhirnya menerima imbas dari mereka yang tidak tertampung di sektor formal. Namun sektor informal inipun memiliki keterbatasan baik dari aspek modal maupun lokasi usaha sehingga perkembangannya tidak selalu berjalan lancar.

3. Pengembangan sumber daya manusia

Kemiskinan juga terjadi lantaran kualitas sumber daya manusia yang rendah baik dari tingkat pendidikan maupun derajat kesehatan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen memperhatikan sisi pendidikan dan kesehatan masyarakatnya, terutama untuk penduduk miskin. Disamping itu untuk mengeksplorasi sumber daya lokal harus diimbangi dengan kemampuan/ ketrampilan sumber daya manusianya terutama angkatan kerja yang harus disiapkan mengelola potensi lokal tersebut. Targetnya adalah memperbanyak tenaga terampil lokal untuk mengelola sendiri potensi lokal sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

4. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (*Endogenous Economic Development*).

Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan membuka lapangan kerja baru. Hal ini akan berhasil dilakukan bila daerah memberi prioritas pada usaha mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang berbasis pada sumber daya lokal. Potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kebumen terutama dari sektor pertanian sudah sepantasnya menempati prioritas utama untuk dikembangkan di masa mendatang.

5. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik.

Perbaikan pelayanan publik terutama diarahkan pada layanan pemerintahan umum yang masuk dalam *One-Stop Services* seperti perizinan, akta catatan sipil dan sebagainya. Perbaikan ini akan menjamin kemudahan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan memudahkan masyarakat luas untuk memperoleh layanan publik yang berkualitas.

6. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha

Kemudahan iklim investasi selain didorong oleh adanya pusat layanan perizinan yang baik, juga harus diimbangi dengan kepastian regulasi dan keamanan investasi di daerah. Tanpa pelayanan yang berkualitas, regulasi yang pro investasi dan

kearifan lokal serta jaminan keamanan, maka investor tidak akan tertarik menanamkan modalnya di daerah.

7. Kerjasama regional.

Kerjasama ini dilakukan untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah. Hal ini penting dilakukan karena dalam era globalisasi dan otonomi daerah, antara satu daerah dengan daerah yang lain terjadi saling ketergantungan. Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan.

8. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Wujud konkritnya adalah peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pelayanan publik serta pengembangan partisipasi masyarakat.

BAB IV
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2005-2025

Memperhatikan potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi Kabupaten Kebumen serta peluang dan tantangan yang diperkirakan muncul selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, juga dengan mempertimbangkan konstelasi regional Jawa Tengah dan Nasional, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis”

Visi tersebut mampu mempertemukan cita-cita Nasional, regional Jawa Tengah dan harapan masyarakat Kabupaten Kebumen. Sebagaimana kita ketahui, visi pembangunan nasional Tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, dan visi pembangunan daerah Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”. Sedangkan harapan Kabupaten Kebumen itu mempertimbangkan fakta bahwa kita memiliki potensi pertanian yang cukup besar namun masih belum mampu mencapai swasembada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada saat yang sama, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kebumen ingin memberikan kontribusi yang

berarti dalam mengembangkan agrobisnis untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.

Selanjutnya, visi pembangunan daerah harus mudah diukur tingkat pencapaiannya sehingga konsep-konsep kunci yang merajut visi tersebut perlu dijelaskan setiap unsurnya. Secara operasional, hal ini akan membantu setiap pemangku kepentingan untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan kemudian bekerjasama secara sinergis dalam mewujudkan visi itu. Dalam hal ini, konsep yang perlu dijelaskan maknanya adalah Kebumen, mandiri, sejahtera dan agrobisnis.

- A. **Kebumen**, adalah suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah), yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. **Mandiri**, artinya suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mampu mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Kemandirian di sini bukan situasi atau kondisi dalam keterisolasian, tetapi konsep dinamis yang mengenal saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang kini tengah berlangsung.

Untuk membangun kemandirian mutlak dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci dari kemandirian itu. Kemandirian suatu daerah, antara lain dapat diukur dari; ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur dalam menjalankan tugasnya; dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Selain itu, kemandirian secara prinsip adalah suatu sikap untuk mengenali potensinya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus mandiri dalam menentukan kebijakan serta memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk pengembangan agrobisnis dan pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan pangan sebagai produk petanian. Kedua kebutuhan ini dengan sendirinya akan tercukupi dengan mengelola sumber daya lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakatnya yakni pertanian.

- C. **Sejahtera** artinya suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan dan pendidikan serta sosial. Untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat ini setidaknya diperlukan dua syarat. Pertama, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri maka masyarakat memerlukan pendapatan perkapita yang cukup. Dalam hal ini maka seberapa jauh pengembangan agrobisnis mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi disertai dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seandainya syarat pertama tidak terwujud, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan mendapatkan bantuan sosial baik dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial lainnya. Untuk bisa mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendapatan regional yang cukup guna membiayai kebutuhan perlindungan sosial tersebut. Dalam hal ini, sumbangan agrobisnis pada pendapatan regional merupakan salah satu tantangan yang cukup besar untuk dipikirkan dalam pengembangan program agrobisnis. Dengan demikian, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar warga, tercapainya

pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi dan berkesinambungan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tersedianya berbagai infrastruktur pelayanan dasar dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik di semua elemen.

- D. **Agrobisnis**, artinya daerah yang mampu menghasilkan produk-produk pertanian dan produk olahan pertanian yang memiliki nilai kompetitif yang tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, maupun internasional. Kabupaten Kebumen yang memiliki basis ekonomi di sektor pertanian ini diharapkan **mampu menjadi daerah agrobisnis terdepan di Jawa Tengah pada Tahun 2025**. Produk pertanian merupakan produk yang dihasilkan secara langsung dari kegiatan bertani. Sementara itu produk olahan pertanian merupakan produk yang dihasilkan setelah produk pertanian tersebut diolah dalam suatu industri agrobisnis baik industri rumah tangga maupun industri besar. Upaya menghasilkan produk pertanian dan produk olahan pertanian secara bersamaan ini sangat penting. Pada satu sisi, Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam dan infrastruktur yang baik guna mengembangkan pertanian. Selain itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen mengembangkan kegiatan ekonominya di sektor

pertanian. Pada sisi yang lain, di Kabupaten Kebumen juga berkembang industri-industri kecil yang mengolah produk pertanian menjadi produk olahan pertanian. Produk pertanian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di tingkat lokal maupun nasional namun pada saat yang sama juga menjadi bahan dasar yang diperlukan industri-industri produk olahan pertanian. Oleh karena itu, keduanya merupakan suatu kesatuan holistik yang tidak dipisahkan. Secara riil keberhasilan menjadi daerah agrobisnis bisa dilihat dari sumbangan subsektor agrobisnis pada tiga hal, yaitu (1) kontribusinya yang signifikan pada pendapatan regional, (2) penyerapan tenaga kerja, dan (3) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengukur pencapaian konsep sebagai daerah agrobisnis terdepan di Jawa Tengah. Signifikansi kontribusi pada pendapatan regional bisa dilihat dari persentase sumbangan sektor pertanian pada pendapatan regional. Sementara itu, seberapa jauh penyerapan tenaga kerja ditunjukkan dengan persentase tingkat partisipasi pekerja di sektor ini dibanding sektor lain di luar sektor pertanian. Sedangkan kesejahteraan masyarakat bisa ditentukan dari seberapa besar perbedaan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dari pendapatan yang diperoleh para pekerja di sektor pertanian (sebelum dan setelah visi diwujudkan).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kelima konsep kunci saling terkait satu sama lain. Kelimanya merupakan suatu jalinan sistemik yang bersifat holistik. Ketidakmampuan mengembangkan produk pertanian misalnya, akan mengganggu pengembangan agrobisnis, menghambat terciptanya kemandirian masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kesulitan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan kelima konsep tersebut perlu diperhatikan secara serius baik konsep tersebut berdiri sendiri maupun sebagai satu kesatuan secara utuh.

Pada tataran yang lebih operasional, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis;
4. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan
5. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk lebih memudahkan pemahaman, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dibagi dalam 4 (empat) tahap dengan periode lima tahunan berdasarkan misi masing-masing.

A. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Sebagai ukuran tercapainya Kebumen mandiri dan sejahtera, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

1. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatnya indeks pembangunan manusia;
 - b. meningkatnya indeks pembangunan gender;
 - c. terkendalnya laju pertumbuhan penduduk; dan
 - d. terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. **Berkurangnya tingkat kemiskinan penduduk** yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;
 - b. meningkatnya tingkat pendapatan penduduk miskin;
 - c. meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan
 - d. meningkatnya harkat hidup dan martabat penduduk miskin.
3. **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis**, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. terwujudnya ketersediaan sumber daya air yang handal untuk irigasi yang didukung kelembagaan dan partisipasi masyarakat ;
 - b. terwujudnya sistem transportasi yang handal yang didukung oleh prasarana dan sarana termasuk jalan dan jembatan ;
 - c. terwujudnya ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang handal untuk pelayanan publik termasuk mendukung pelaksanaan *e Government* (penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik);

- d. terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik termasuk pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan;
 - e. terwujudnya ketersediaan energi yang bagi masyarakat yang didukung oleh pengembangan energi alternatif;
 - f. terwujudnya penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh untuk pemerataan dan penyerasian pembangunan wilayah; dan
 - g. terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan yang didukung peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan.
4. **Berkembangnya agrobisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan**, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
- a. meningkat dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang berbasis pada agrobisnis yang mendorong pendapatan perkapita, sehingga dapat bersaing dan menjadi yang terdepan diantara beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. meningkatnya keunggulan sektor pertanian yang kompetitif, yang membentuk struktur perekonomian daerah dengan dukungan beberapa sektor lain seperti perdagangan,

industri, dan pariwisata yang memiliki daya saing kuat di pasar nasional dan internasional;

- c. terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bermutu aman hingga tingkat masyarakat terbawah didukung oleh swasembada pangan dan kestabilan harga pangan;
- d. meningkatnya kegiatan agrobisnis yang ditopang oleh sektor perdagangan dan industri serta jasa pariwisata khususnya wilayah perdesaan; dan
- e. meningkatnya diversifikasi jenis-jenis agrobisnis yang berasal dari produk pertanian untuk menjamin keberlangsungan produk dan aksesibilitas pasar nasional dan internasional.

5. **Tercapainya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :**

- a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel;
- b. meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur, serta kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik berlandaskan hukum;
- d. meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah;
- e. meningkatnya kepekaan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik;
- f. meningkatnya kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal/regional, nasional dan internasional; dan
- g. meningkatnya komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai serta strategi untuk mencapainya. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten

Kebumen Tahun 2005-2025 adalah **Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis**, sebagai landasan bagi pembangunan tahap berikutnya menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia** dicapai melalui :
 - a. pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan;
 - c. penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan;
 - d. peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - f. peningkatan kemampuan dalam pemberantasan penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif; dan
 - g. pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

2. **Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk** dicapai melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;
 - b. peningkatan pendapatan penduduk miskin;
 - c. peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan
 - d. peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.
3. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis** yang dicapai melalui :
 - a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
 - b. penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal;
 - c. pembangunan media komunikasi dan informatika;
 - d. peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - e. penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
 - f. peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi;
 - g. peningkatan dan pemantapan manajemen, sistem, dan kapasitas transportasi;

- h. pembangunan perhubungan yang diarahkan pada peningkatan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- i. pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat dan kawasan hutan lindung
- j. peningkatan pembangunan energi dan pemanfaatan pertambangan;
- k. pembinaan manajemen pertambangan rakyat;
- l. pengembangan energi alternatif;
- m. pengembangan pengelolaan pertambangan dan pengembangan energi;
- n. perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang;
- o. pemerataan dan penyerasian pembangunan wilayah;
- p. perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- q. peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;
- r. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan; dan
- s. pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

4. **Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan**, yang dicapai melalui :
- a. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal;
 - b. pelibatan masyarakat secara intensif dalam pengembangan agrobisnis;
 - c. pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kebumen;
 - d. mendorong terwujudnya kelompok tani, nelayan dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang kuat;
 - e. peningkatan ketersediaan bahan baku dan modal untuk pengembangan agrobisnis;
 - f. pengembangan sistem tatakelola yang mendukung pengembangan agrobisnis;
 - g. mendorong penguatan modal kolektif petani;
 - h. mendorong peran pedagang perantara untuk membangun kemitraan yang adil dan peduli petani, serta menciptakan pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek;
 - i. meningkatkan layanan informasi bagi petani;
 - j. penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;

- k. pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- l. mengembangkan sektor pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- m. peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata alam.

5. **Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan, yang dicapai melalui :**

- a. penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e. meningkatkan ketertiban di masyarakat terutama berkaitan dengan perizinan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pemantapan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di setiap penyelenggaraan pemilu;

- g. pemantapan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan publik sebagai upaya meningkatkan kapabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. pemantapan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur secara transparan;
- j. pemantapan pengembangan mekanisme pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik; dan
- k. peningkatan komitmen perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

C. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan,

tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1. RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- 1) Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai;
- 2) Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- 3) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah;
- 4) Penguatan manajemen institusi pendidikan menuju profesionalitas, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik;
- 5) Pembinaan pendidikan luar sekolah;

- 6) Pengembangan pendidikan kejuruan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil;
- 7) Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap kesehatan individu;
- 8) Pengembangan jenis pelayanan kesehatan untuk kalangan usia lanjut;
- 9) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan;
- 10) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
- 11) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan dalam rangka mewujudkan visi Kebumen Sehat 2010;
- 12) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta perlindungan anak;
- 13) Peningkatan toleransi kerukunan hidup beragama; dan
- 14) Pembinaan sistem perlindungan perempuan dan anak.

b. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan dan kemampuan pembiayaan kesehatan agar mampu terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di pedesaan;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau;
- 3) Peningkatan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Peningkatan partisipasi kesetiakawanan sosial agar mampu mencegah secara dini munculnya permasalahan sosial; dan
- 5) Pengembangan kajian dan pola-pola jaminan sosial.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis

- 1) Pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- 2) Pengelolaan hutan secara bijaksana untuk mendukung kelestarian lingkungan dan penyediaan sumber air bersih;

- 3) Peningkatan keterpaduan sistem transportasi yang diarahkan pada penyusunan tataran transportasi lokal (tatalok);
- 4) Peningkatan pembangunan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan pegunungan serta kawasan strategis;
- 5) Peningkatan pembangunan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan pegunungan serta kawasan strategis;
- 6) Pelayanan jasa komunikasi dan informatika diarahkan pada perluasan jangkauan layanan dengan mempertimbangkan pengaturan menara bersama dengan dukungan penyedia jasa layanan komunikasi swasta;
- 7) Peningkatan pembangunan energi dan pemanfaatan pertambangan untuk peningkatan produktivitas ekonomi;
- 8) Pembinaan manajemen pertambangan rakyat;
- 9) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertambangan dan energi sehingga mampu mengelola pembangunan pertambangan dan energi;

- 10) Peningkatan penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 11) Peningkatan sinergitas pembangunan pertambangan dan energi dengan kelestarian lingkungan hidup;
- 12) Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- 13) Peningkatan sosialisasi dan fungsi koordinasi kelembagaan masyarakat dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana alam;
- 14) Peningkatan pembangunan energi dan pemanfaatan pertambangan untuk peningkatan produktivitas ekonomi;
- 15) Pembinaan manajemen pertambangan rakyat;
- 16) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertambangan dan energi sehingga mampu mengelola pembangunan pertambangan dan energi;
- 17) Peningkatan penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;

- 18) Peningkatan sinergitas pembangunan pertambangan dan energi dengan kelestarian lingkungan hidup;
- 19) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang untuk menata pembangunan kawasan strategis;
- 20) Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang diarahkan pada ketersediaan rencana pengembangan kawasan strategis melalui :
 - a) Pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang telah ada; dan
 - b) Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan terutama di kawasan strategis dan cepat tumbuh.
- 21) Peningkatan kebersihan dan ketersediaan pertamanan;
- 22) Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi di pedesaan dan perkotaan; dan
- 23) Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan pedesaan.

d. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan

- 1) Peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah, petani, nelayan dan pelaku pertanian lain serta penguatan lembaga pendukungnya;

- 2) Peningkatan produktivitas pertanian, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada system agorbisnis;
- 3) Peningkatan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi serta sarana prasarana pendukungnya;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, pariwisata dan industri;
- 5) Peningkatan akses pelaku usaha dan petani ke sumber daya produktif; dan
- 6) Peningkatan kemitraan dan jaringan pasar.

e. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan

- 1) Peningkatan kemampuan dan kecepatan dalam mitigasi dan penanganan akibat bencana alam dan bencana sosial;
- 2) Pembuatan dan penetapan peraturan daerah yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 3) Penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman;

- 4) Penyebarluasan informasi tentang peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman;
- 5) Penciptaan suasana yang aman, tertib dan damai di setiap penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menangani ketertiban dan ketentraman;
- 7) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penegakan supermasi hukum;
- 8) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 9) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengutamakan:
 - a) Evaluasi dan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah agar berfungsi secara efisien dan efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

- b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan;
- c) Penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif dan tanggap kebutuhan sebagai upaya peningkatan akomodasi aspirasi masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan pembangunan daerah;
- d) Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- e) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem pembinaan karier berdasarkan prestasi;
- f) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government serta peningkatan sistem pengelolaan arsip negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan; dan
- g) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap pelayanan publik.

- 10) Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui :
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan; dan
 - c) Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi yang mampu melayani seluruh masyarakat.

2. RPJMD Tahap II (Tahun 2010-2014)

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- 1) Peningkatan akses masyarakat terutama penduduk miskin harus bisa memperoleh pendidikan yang didukung dengan upaya untuk mempersiapkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

- 2) Peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui:
 - a) Peningkatan kapabilitas tenaga pendidik yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang;
 - b) Penyusunan kurikulum yang mampu mendorong kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri; dan
 - c) Peningkatan kapabilitas lembaga pendidikan menuju berstandar nasional/ internasional.
 - d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Peningkatan prestasi olahraga serta kualitas dan partisipasi generasi muda di berbagai bidang pembangunan;
- 4) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 5) Peningkatan pendidikan kejuruan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil pada bidang agrobisnis;

- 6) Peningkatan sumber daya manusia di dalam memberikan ketrampilan dalam bidang pendidikan, di luar ekstrakurikuler.
- 7) Peningkatan kemampuan/kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- 9) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja;
- 10) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 11) Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak; dan
- 12) Peningkatan toleransi kerukunan hidup beragama.

b. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta sarana sanitasi lingkungan;
- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil;
- 3) Peningkatan kualitas hidup untuk penduduk miskin;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

- 5) Pemantapan kepekaan masyarakat dengan penanganan permasalahan sosial;
- 6) Peningkatan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan social;
- 7) Peningkatan efisiensi distribusi untuk menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup; dan
- 8) Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis

- 1) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, yang didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air;

- 2) Pengembangan pelayanan jasa perhubungan diarahkan pada pengembangan sistem transportasi sesuai dengan Tatahan Transportasi Lokal yang terintegrasi dengan sistem transportasi regional dan nasional dengan memperhatikan peningkatan keselamatan pengguna jalan;
- 3) Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antarwilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau;
- 4) Peningkatan perbaikan jalan dan pengembangan kapasitas jalan antar desa, antar kecamatan dan pusat pertumbuhan sektor utama;
- 5) Pelayanan jasa komunikasi dan informatika diarahkan pada perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan telematika;
- 6) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun aplikasinya;
- 7) Pemantapan pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat sebagai upaya meningkatkan

- produktivitas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- 8) Pengelolaan hutan secara bijaksana melalui penerapan kawasan lindung untuk mendukung kelestarian lingkungan dan penyediaan sumber air bersih dan sumber penyediaan air baku;
 - 9) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung;
 - 10) Peningkatan inventarisasi, identifikasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya genetik;
 - 11) Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengembangan teknologi yang ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan;
 - 12) Peningkatan kapasitas Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana alam; serta

- 13) Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- 14) Perluasan dan peningkatan ketersediaan energi listrik untuk perluasan industri melalui peningkatan jaringan listrik baru;
- 15) Pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan dinamika lokasi-lokasi peruntukan industri skala kecil, menengah, koperasi dan jenis-jenis industri prioritas, pertanian, permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
- 16) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang terkait dengan pengendalian dan penataan ruang;
- 17) Peningkatan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan;
- 18) Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang diarahkan pada pengkajian ulang dan penyusunan Rencana Tata Ruang pada kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- 19) Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah yang didasarkan pada karakteristik, potensi dan

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan peran dan fungsi perkotaan, peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah;

- 20) Peningkatan penanganan kebersihan dan ketersediaan pertamanan;
- 21) Peningkatan kualitas pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;
- 22) Peningkatan ketersediaan rumah layak huni serta prasarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara merata, efisien dan efektif;
- 23) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembang dalam pembangunan infrastruktur pelengkap untuk meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan; dan
- 24) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam manajemen lingkungan permukiman

d. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan

- 1) Pengembangan peran usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan;
- 2) Pengembangan produksi pertanian, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agrobisnis yang didukung sarana prasarana dan teknologi yang memadai;
- 3) Pengembangan inovasi/diversifikasi produk industri, perdagangan dan pariwisata;
- 4) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, pariwisata dan industri;
- 5) Pengembangan akses pelaku usaha dan petani ke sumber daya produktif; dan
- 6) Pengembangan kemitraan dan jaringan pasar.

e. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan

- 1) Peningkatan kemampuan dalam mitigasi dan penanganan akibat bencana dan bencana sosial;
- 2) penyesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dengan memperhatikan kearifan lokal;
- 3) Peningkatan penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman dan penerapan sanksi yang tegas;
- 4) Peningkatan kondisi yang aman, tertib dan damai di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menangani ketertiban dan ketentraman;
- 6) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), serta penegakan supremasi hukum;
- 7) Pemantapan kualitas pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- 8) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan prinsip murah, mudah dan terjangkau oleh masyarakat;
- 9) Perluasan akses yang diikuti dengan meningkatnya kualitas informasi publik untuk mendukung prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 10) Peningkatan sistem mekanisme dan perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah; dan
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjamin dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RPJMD Tahap III (Tahun 2015-2019)

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- 1) Peningkatan dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun disertai dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan;
- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- 3) Pengembangan kualitas pendidikan agar mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*);
- 4) Pemantapan kapasitas lembaga pendidikan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk tanggungjawab pendidikan secara bersama-sama;
- 5) Pengembangan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk;
- 6) Peningkatan pembinaan olah raga dengan melibatkan peran yang lebih besar dari masyarakat;
- 7) Pemantapan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- 8) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja;
- 9) Penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan bisa diakses oleh masyarakat luas;

- 10) Pengembangan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 11) Pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak; dan
- 12) Pemantapan kerukunan hidup beragama.

b. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk

- 1) Pemantapan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Pemantapan kepekaan masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial;
- 4) Pengembangan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- 5) Pemantapan pengembangan kualitas hidup peran perempuan dan anak dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 6) Pengembangan sistem perlindungan perempuan dan anak;

- 7) Pemantapan efisiensi distribusi untuk menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup; dan
- 8) Pemantapan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis

- 1) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi yang handal untuk mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan;
- 2) Pengembangan pelayanan jasa perhubungan diarahkan pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta ketersediaan jaringan infrastruktur transportasi;
- 3) Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi;

- 4) Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran;
- 5) Pelayanan jasa komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan telematika;
- 6) Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi;
- 7) Peningkatan produktivitas lahan dan hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- 8) Pengelolaan hutan secara bijaksana untuk mendukung kelestarian lingkungan dan penyediaan sumber air;
- 9) Peningkatan upaya perlindungan kawasan hutan sebagai sumber penyediaan air baku;

- 10) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya;
- 11) Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 12) Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kerjasama kelembagaan dan masyarakat serta penegakan hukum lingkungan;
- 13) Pengembangan kapasitas Pemerintah dan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana alam;
- 14) Pengembangan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup;
- 15) Pemantapan pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi;
- 16) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertambangan dan energi sehingga mampu mengelola pembangunan pertambangan dan energi;

- 17) Pemantapan pengembangan penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi;
- 18) Peningkatan sinergitas pembangunan pertambangan dan energi dengan kelestarian lingkungan hidup dengan pemberlakuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 19) Pengembangan energi alternatif;
- 20) Pengembangan modal yang lebih signifikan untuk produksi pertambangan dan pengembangan energi;
- 21) Penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang terkait dengan pengendalian dan penataan ruang;
- 22) Penguatan pemanfaatan tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan;
- 23) Pengembangan wilayah pembangunan melalui peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- 24) Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antarwilayah untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerjasama pengembangan kawasan strategis, pemantapan peran

dan fungsi perkotaan, peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah;

- 25) Peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan sanitasi dan ketersediaan pertamanan serta pemanfaatan limbah;
- 26) Penurunan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada Tahun 2015;
- 27) Pencapaian 65% (enam puluh lima persen) rumah tangga yang memiliki sanitasi aman pada Tahun 2015; dan
- 28) Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukiman bagi masyarakat, serta pengembangan untuk menunjang perekonomian daerah.

d. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan

- 1) Penguatan peran usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan;

- 2) Penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah serta petani untuk mendukung pengembangan agrobisnis;
- 3) Penguatan kelembagaan agrobisnis;
- 4) Penguatan sektor industri dan pariwisata untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif;
- 5) Penguatan produktivitas pertanian, kelautan dan kehutanan untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 6) Penguatan akses pelaku usaha dan petani ke sumber daya produktif; dan
- 7) Penguatan kemitraan dan jaringan pasar.

e. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan

- 1) Pemantapan pengembangan kesetiakawanan sosial di masyarakat;
- 2) Pemantapan pengembangan kapasitas pemerintahan dan masyarakat terhadap upaya-

upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

- 3) Pemantapan penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 4) Pemantapan kondisi yang aman, tertib dan damai di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk menjamin stabilitas daerah;
- 5) Pemantapan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berorientasi kepuasan publik sebagai upaya meningkatkan kapabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik;
- 6) Pemantapan kualitas pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif sehingga terwujud pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Pengembangan peluang, kesempatan dan kemudahan kerjasama dalam mendukung kemajuan daerah;
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; dan

- 9) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4. RPJMD Tahap IV (Tahun 2020-2024)

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- 1) Peningkatan kerjasama yang harmonis dari semua pihak dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal agar masyarakat memiliki profesionalisme yang memadai;
- 4) Peningkatan kerjasama yang harmonis dalam pembinaan olahraga bagi generasi muda;
- 5) Mempertahankan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;

- 6) Menjaga keberlangsungan penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat luas;
- 7) Meningkatkan angka harapan hidup dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 8) Pemantapan kesehatan reproduksi remaja;
- 9) Pelestarian pengembangan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, serta perlindungan anak;
- 10) Pemantapan sistem perlindungan perempuan dan anak; dan
- 11) Pelestarian kerukunan hidup beragama.

b. Mengurangi tingkat kemiskinan penduduk

- 1) Mempertahankan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- 2) Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Pelestarian pengembangan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan sosial;
- 4) Pemantapan kemampuan penanganan masalah sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial,

peningkatan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam kegiatan usaha kesejahteraan social;

- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka efisiensi distribusi pangan yang menjamin agar rumah tangga miskin dan rawan pangan dapat menjangkau kemandirian pangan; dan
- 6) Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi seimbang, keamanan dan kehalalan pangan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis

- 1) Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pengembangan pelayanan jasa perhubungan diarahkan pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta ketersediaan jaringan infrastruktur transportasi;

- 3) Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi;
- 4) Pengembangan pelayanan jasa komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan pemanfaatan telekomunikasi dalam segala aspek kehidupan melalui penyelenggaraan jaringan telematika yang handal bagi seluruh masyarakat;
- 5) Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya;
- 6) Pelayanan jasa komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan telematika;
- 7) Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan

industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi;

- 8) Peningkatan produktivitas lahan dan hasil hutan sekitar kawasan hutan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- 9) Pengelolaan hutan secara bijaksana untuk mendukung kelestarian lingkungan dan sumber air;
- 10) Peningkatan upaya perlindungan kawasan hutan sebagai sumber penyediaan air baku;
- 11) Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan;
- 12) Pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 13) Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan;

- 14) Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem untuk mengurangi risiko dampak bencana alam;
- 15) Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup;
- 16) Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan jaringan listrik baru;
- 17) Pemantapan pembangunan pertambangan dan energi untuk penyediaan kebutuhan industri dalam menunjang peningkatan produktivitas ekonomi rakyat;
- 18) Peningkatan sumberdaya manusia pertambangan dan energi sehingga mampu mengelola pembangunan pertambangan dan energi;
- 19) Pemantapan penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi;
- 20) Peningkatan sinergitas pembangunan pertambangan dan energi dengan kelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- 21) Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri;
- 22) Pengembangan modal yang lebih signifikan untuk produksi pertambangan dan pengembangan energi;
- 23) Pemantapan penataan ruang yang berkelanjutan;
- 24) Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal;
- 25) Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang diarahkan pada pengkajian ulang dan penyusunan Rencana Tata Ruang pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, tertatanya kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis yang akomodatif terhadap perkembangan wilayah;
- 26) Pemantapan sistem pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- 27) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan permukiman yang berkualitas

dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup; dan

- 28) Pengembangan perumahan dan permukiman dengan mengacu pada pembangunan berkelanjutan.

d. Mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan

- 1) Pemantapan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki daya saing dan mampu menembus pasar global;
- 2) Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk yang bertumpu pada sistem agrobisnis;
- 3) Pemantapan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor industri, pertanian dan pariwisata; dan
- 4) Pemantapan kemitraan dan jaringan pasar.

e. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan

- 1) Pelestarian pengembangan kesetiakawanan sosial di masyarakat;
- 2) Pelestarian pengembangan kapasitas pemerintahan dan masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial;
- 3) Perwujudan sosial budaya masyarakat yang sadar hukum sebagai bagian dari kewajiban untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- 4) Perwujudan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, tertib dan damai serta penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- 5) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan publik sebagai upaya meningkatkan kapabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik;

- 6) Pemantapan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 7) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur secara transparan; dan
- 8) Pemantapan sistem pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan makro yang berwawasan dua puluh tahun ke depan dan memuat visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini akan digunakan sebagai pedoman oleh Bupati dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 berisi visi Kabupaten Kebumen untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan lima misi yang yang dilaksanakan secara simultan dan dijabarkan dalam arah kebijakan berdasarkan fungsi serta tahap pencapaian setiap lima tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdimensi

waktu 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berdimensi waktu tahunan;

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan termasuk masyarakat luas berkewajiban untuk mewujudkan visi **Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis** dengan berpedoman pada arah kebijakan pada masing-masing tahap lima tahunan berdasarkan fungsi yang diemban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
4. Masyarakat berpartisipasi dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan untuk mencapai visi **Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis**.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik selama kurun waktu dua puluh tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini perlu dikomunikasi dan disosialisasikan kepada seluruh aparat birokrasi di jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha.

Selanjutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan visi **Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis** tersebut perlu didukung oleh komitmen dan partisipasi dari: (1) kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati serta kerja keras jajaran eksekutif, (2) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, (3) Lembaga Yudikatif di Kabupaten Kebumen,

(4) Pemerintah atasan dan (5) partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, utamanya masyarakat dan dunia usaha.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

Ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah Kabupaten Kebumen sesuai visi, misi dan arah kebijakan daerah, serta menjamin keserasian dengan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 20 tahun, maka disusun pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kebumen jangka waktu 20 tahun. Penyusunan RPJP Daerah ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dan di masa depan. Terlebih saat ini, sistem pemilihan Bupati dilaksanakan secara langsung.

RPJP Daerah ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana program pembangunan tahunan. Dalam RKPD dimuat prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro, serta program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah untuk; (a) memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan visi, misi dan program yang telah disepakati, (b) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, dan (c) menjamin terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 36